

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Eksplorasi Lapangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh terhadap kinerja guru di SMP Negeri 62 Muaro Jambi. Dalam proses pengumpulan data, kegiatan lapangan dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, yaitu pra-eksplorasi lapangan, eksplorasi, studi lapangan I, dan studi lapangan II.

4.1.1 Pra-Eksplorasi Lapangan

Dalam tahap awal penelitian ini, peneliti memulai proses dengan melakukan studi pustaka secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), prinsip-prinsip manajemen pendidikan, serta indikator kinerja guru yang relevan dengan konteks Sekolah Menengah Pertama (SMP). Studi pustaka ini bertujuan untuk membangun landasan teoritis dan konseptual yang kokoh sebelum memasuki tahapan lapangan. Peneliti menelaah berbagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya yang berkaitan dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS, distribusi dana, serta mekanisme pelaporannya. Selain itu, jurnal-jurnal akademik nasional dan internasional yang membahas efektivitas manajemen dana sekolah dan kontribusinya

terhadap peningkatan mutu pendidikan juga menjadi referensi utama.

Aspek kinerja guru dikaji melalui teori-teori pendidikan yang menekankan dimensi kompetensi pedagogik, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Peneliti mengacu pada konsep-konsep dari para pakar seperti (Mulyasa, 2014) untuk memahami bagaimana dana BOS dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kinerja guru, baik melalui pelatihan, penyediaan sarana pembelajaran, maupun insentif yang relevan.

Sebagai peneliti yang juga merupakan guru aktif di SMP Negeri 62 Muaro Jambi, pendekatan penelitian ini bersifat partisipatif dan etis. Kedekatan peneliti dengan konteks lapangan memberikan keuntungan tersendiri, karena peneliti memahami dinamika internal sekolah, budaya organisasi, serta pola komunikasi antar pemangku kepentingan. Namun, untuk menjaga objektivitas dan menghindari konflik kepentingan, peneliti menerapkan prinsip etika penelitian seperti transparansi, informed consent, dan kerahasiaan data informan.

Dalam mempersiapkan pengumpulan data, peneliti menyusun instrumen penelitian yang mencakup pedoman wawancara terbuka dan panduan observasi non-partisipatif. Instrumen ini dirancang untuk menggali secara mendalam bagaimana praktik manajemen dana BOS dilakukan di tingkat sekolah, serta bagaimana hal tersebut berdampak terhadap motivasi, disiplin, dan hasil kerja guru. Fokus observasi diarahkan pada proses pengambilan keputusan, distribusi dana, dan

keterlibatan guru dalam pemanfaatan dana BOS.

Koordinasi awal dilakukan dengan kepala sekolah dan bendahara BOS untuk menyampaikan maksud dan tujuan penelitian, sekaligus memperoleh persetujuan resmi. Dalam pertemuan koordinatif ini, peneliti juga mendiskusikan waktu dan metode pelaksanaan yang tidak mengganggu aktivitas akademik. Ini menunjukkan komitmen peneliti untuk menjalankan penelitian yang harmonis dengan kegiatan sekolah.

Pemilihan informan kunci dilakukan secara purposif, yaitu memilih individu yang memiliki pengetahuan strategis tentang kebijakan dan praktik manajemen dana BOS serta yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Informan terdiri dari kepala sekolah yang bertindak sebagai penanggung jawab utama, bendahara BOS yang memahami teknis penggunaan anggaran, serta guru-guru dari berbagai bidang studi yang dapat memberikan perspektif beragam mengenai dampak penggunaan dana terhadap pelaksanaan tugas mereka di kelas. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh dan kontekstual mengenai efektivitas Manajemen dana BOS dalam meningkatkan kinerja guru di lingkungan SMP.

Secara sistematis, langkah-langkah kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Langkah-Langkah Pra-Eksplorasi
Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 62 Muaro Jambi yang terletak di sebuah desa yang asri, yaitu Desa Talang Kerinci, yang berada di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Secara administratif, sekolah ini berada di RT 07 Dusun Talang Bandung. Lokasi sekolah dapat ditemukan di koordinat lintang -1 dan bujur 103. Dengan suasana yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, SMP Negeri 62 Muaro Jambi menjadi tempat pendidikan yang ideal bagi siswa-siswi di sekitar Desa Talang Kerinci dan sekitarnya. Sebagai bagian dari Kabupaten Muaro Jambi, sekolah ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan formal, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, SMP Negeri 62 Muaro Jambi juga memainkan peran dalam membentuk karakter dan potensi generasi muda di daerah ini. Dengan adanya berbagai fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar, sekolah

ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah yang relatif terpencil, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan membuka peluang masa depan yang lebih baik. Keberadaan sekolah ini juga mendukung program pemerintah dalam pemerataan pendidikan di daerah.

Kemudian peneliti melakukan perencanaan jadwal untuk mengumpulkan data secara lengkap. Berikut jadwal yang telah disusun:

Tabel 4.1 Jadwal Penelitian

No	Hari/Tanggal	Lokasi	Kegiatan		Waktu	Partisipan	
			Wawancara	Observasi		IK	P
1	24/02/2025	SMP N 62 Ma. Jambi		√	12.00 s/d Selesai	IK1, IK2, IK3	P
2	25/02/2025		√		09.00 s/d Selesai	IK1	P
3	26/02/2025		√	√	09.00 s/d Selesai	IK2	P
4	27/02/2025		√		08.30 s/d Selesai	IK2	P
5	28/02/2025		√		09.00 s/d Selesai	IK2	P
6	28/02/2025		√		10.00 s/d Selesai	IK3	P

Ket:

IK: Informan Kunci

P: Peneliti

4.1.2 Studi Lapangan I

Pada tahap Studi Lapangan I, peneliti mulai memasuki fase penting dalam proses penelitian, yaitu pengumpulan data secara sistematis dan terstruktur. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memperoleh data

empiris yang menggambarkan persepsi guru serta praktik nyata di lapangan terkait Manajemen dana BOS dan dampaknya terhadap kinerja guru. Sebagai langkah awal, peneliti menerapkan metode wawancara semi-terstruktur dan observasi non-partisipatif yang telah disiapkan sebelumnya dalam instrumen penelitian.

Metode wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam eksplorasi data. Dengan menggunakan panduan pertanyaan yang bersifat terbuka, peneliti dapat menggali pandangan guru secara lebih mendalam tanpa membatasi jawaban mereka. Beberapa guru dari berbagai bidang studi menjadi partisipan dalam sesi wawancara ini. Mereka dipilih berdasarkan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kedekatan mereka dengan penggunaan sarana dan prasarana yang didanai oleh BOS. Fokus utama dari wawancara adalah menggali persepsi guru mengenai tingkat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam Manajemen dana BOS di sekolah.

Dalam proses wawancara, peneliti mencatat bahwa sebagian besar guru memiliki pemahaman dasar mengenai keberadaan dana BOS, namun terdapat variasi dalam pemahaman mereka tentang mekanisme penggunaannya. Beberapa guru menyampaikan bahwa informasi tentang alokasi dana dan peruntukannya belum sepenuhnya disosialisasikan secara terbuka. Ada pula yang merasa dilibatkan secara pasif dalam proses perencanaan penggunaan dana, seperti dalam rapat-rapat sekolah, tetapi tidak memiliki akses terhadap laporan penggunaan dana secara rinci. Hal ini menunjukkan adanya

kesenjangan antara kebijakan partisipatif yang diharapkan dalam Manajemen dana BOS dengan praktik di lapangan.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Observasi ini diarahkan khususnya pada penggunaan sarana pembelajaran yang bersumber dari dana BOS, seperti buku paket, perangkat teknologi pendidikan, alat peraga, dan fasilitas penunjang lainnya. Peneliti mengamati sejauh mana sarana tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh guru dalam proses belajar mengajar. Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pemanfaatan sarana antar kelas atau antar guru. Beberapa guru terlihat aktif menggunakan alat bantu seperti proyektor dan bahan ajar cetak, sementara yang lain masih mengandalkan metode konvensional tanpa banyak integrasi dengan fasilitas yang tersedia.

Temuan ini menjadi indikasi awal adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas penggunaan dana BOS, seperti pelatihan guru, kesiapan infrastruktur, serta budaya organisasi sekolah. Peneliti mencatat bahwa keberadaan sarana belum otomatis menjamin peningkatan kualitas pembelajaran, kecuali didukung oleh kompetensi guru dan manajemen yang terstruktur.

Secara keseluruhan, Studi Lapangan I memberikan fondasi awal yang penting untuk memahami dinamika Manajemen dana BOS dari sudut pandang praktisi pendidikan di tingkat sekolah. Data yang diperoleh akan menjadi dasar untuk perumusan temuan awal, serta sebagai bahan

pertimbangan dalam tahap lanjutan penelitian, yaitu analisis mendalam terhadap keterkaitan antara manajemen dana BOS dan indikator kinerja guru. Berikut dokumen yang dikumpulkan (lihat pada lampiran):

a) Profil SMP N 62 Muaro Jambi

SMP Negeri 62 Muaro Jambi adalah salah satu sekolah menengah pertama yang terletak di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sekolah ini didirikan berdasarkan SK Nomor 242 pada tanggal 23 Agustus 2010 dan berada di bawah kepemilikan Pemerintah Daerah. Sekolah telah memiliki rekening atas nama institusi di BANK 9 KCP Sengeti dan tidak memungut iuran dari siswa. Meskipun telah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan bersedia menerima dana BOS, sekolah ini belum bersertifikasi ISO.

Dalam hal kontak, sekolah memiliki email aktif dan situs web, namun tidak mencantumkan nomor telepon atau fax. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan pagi hari selama enam hari dalam seminggu, dengan akses internet 30 Mb dan sumber listrik dari PLN berkekuatan 1300 watt.

Dari sisi sanitasi, air bersih tersedia dari sumur terlindungi dan air minum disediakan oleh siswa. Sekolah memiliki jamban dengan tipe leher angsa yang dapat digunakan oleh siswa laki-laki dan perempuan, namun tidak dilengkapi dengan fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus. Jumlah tempat cuci tangan adalah nol, meskipun disebutkan adanya

sabun dan air mengalir. Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah, tetapi belum pernah menguras tangki septik dalam lima tahun terakhir.

Sarana kebersihan cukup tersedia, seperti tempat sampah di setiap kelas dan TPS tertutup, meskipun fasilitas sanitasi perempuan seperti tempat sampah tertutup dan cermin belum tersedia. Perencanaan dan anggaran pemeliharaan sanitasi belum dilakukan, namun ada kegiatan rutin melibatkan siswa serta kemitraan dengan puskesmas dan lembaga non-pemerintah untuk sanitasi

b) Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan suatu gambaran terkait sumber daya manusia yang mendukung proses pendidikan di sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran masing-masing dalam mendukung keberhasilan program pendidikan dan Manajemen sekolah. SMP Negeri 62 Muaro Jambi memiliki total 9 orang pendidik dan tenaga kependidikan. Dari jumlah tersebut, 7 orang berstatus sebagai guru, terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan. Selain itu, terdapat 1 kepala sekolah (perempuan), 1 wakil kepala sekolah (perempuan), dan 1 tenaga kependidikan (perempuan). Komposisi ini menunjukkan dominasi perempuan dalam posisi manajerial dan pendukung, serta distribusi gender yang relatif seimbang di kalangan guru. Hal ini mencerminkan keberagaman dan keterwakilan gender yang cukup baik dalam struktur organisasi sekolah.

c) Peserta Didik SMP N 62 Muaro Jambi

Berikut ini adalah gambaran mengenai keadaan siswa di SMP Negeri 62 Muaro Jambi. Berdasarkan data peserta didik pada SMP Negeri 62 Muaro Jambi, jumlah keseluruhan siswa hingga akhir bulan terakhir tercatat sebanyak 47 orang, yang terdiri dari 26 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. Jika dilihat berdasarkan jenjang kelas, kelas VII memiliki jumlah terbanyak, yaitu 23 siswa (11 laki-laki dan 12 perempuan). Kelas VIII diisi oleh 17 siswa, dengan dominasi laki-laki yaitu 13 orang, sementara hanya 4 orang siswa perempuan. Sementara itu, kelas IX merupakan kelas dengan jumlah siswa paling sedikit, yakni hanya 6 siswa laki-laki dan ada 2 siswa perempuan. Pada bulan pelaporan ini, tidak terdapat siswa baru yang masuk maupun siswa yang keluar, sehingga kondisi jumlah peserta didik tergolong stabil. Distribusi jumlah siswa yang tidak merata, khususnya pada kelas IX yang sangat minim, dapat menjadi perhatian dalam perencanaan dan pengembangan pendidikan di sekolah tersebut, termasuk dalam hal pemerataan sumber daya pembelajaran serta kebijakan penerimaan peserta didik baru.

d) Rombongan Belajar SMP N 62 Muaro Jambi

Berikut ini adalah informasi mengenai rombongan belajar di SMP Negeri 62 Muaro Jambi. SMP Negeri 62 Muaro Jambi memiliki tiga rombongan belajar, masing-masing mewakili tingkat kelas VII, VIII, dan IX. Kelas VII merupakan rombongan belajar dengan jumlah siswa terbanyak, yaitu 23 siswa yang terdiri dari 11 laki-laki dan 12 perempuan, dengan

Lindriana Safitri sebagai wali kelas dan menggunakan Ruang Kelas 7. Kelas VIII memiliki total 17 siswa (13 laki-laki dan 4 perempuan), diasuh oleh Muhammad Isnaini dan menempati Ruang Kelas 8. Sementara itu, Kelas IX merupakan rombel dengan jumlah siswa paling sedikit, yaitu hanya 8 siswa (6 laki-laki dan 2 perempuan), di bawah bimbingan Elfrida Sinambela dan menggunakan Lab IPA sebagai ruang belajar.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan jumlah siswa antar jenjang kelas, dengan penurunan signifikan pada tingkat akhir. Hal ini dapat menjadi indikator untuk evaluasi terhadap keberlangsungan peserta didik hingga tingkat akhir dan perencanaan strategi peningkatan retensi siswa.

e) Sarana dan Prasarana

Berikut ini adalah informasi mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di SMP Negeri 62 Muaro Jambi. Sekolah ini memiliki kelengkapan fasilitas dasar untuk mendukung proses belajar mengajar, meskipun masih dalam skala terbatas. Terdapat tiga ruang utama untuk kegiatan pembelajaran, yakni Ruang Kelas 7, Ruang Kelas 8, dan Lab IPA, masing-masing telah dilengkapi dengan sarana belajar seperti meja dan kursi siswa, meja dan kursi guru, papan tulis, lemari, tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding, papan pajang, serta soket listrik.

Fasilitas sanitasi terdiri dari dua unit WC, yaitu untuk guru dan murid, yang masing-masing dilengkapi dengan kloset jongkok, tempat air (bak), gayung, tempat sampah, dan gantungan pakaian. Ketersediaan peralatan pendukung kebersihan seperti tempat sampah dan tempat cuci tangan di

berbagai ruang menunjukkan adanya upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah.

Namun, jumlah meja dan kursi siswa di beberapa kelas masih terbatas, seperti hanya tersedia 7 buah meja dan kursi siswa di Ruang Kelas 7, yang tidak sebanding dengan jumlah siswa yang mencapai 23 orang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah sarana yang tersedia dengan kebutuhan aktual, sehingga perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sarana prasarana ke depan. Di sisi lain, fasilitas di Lab IPA tergolong lengkap dan seragam dengan kelas lainnya, menunjukkan fungsinya yang juga merangkap sebagai ruang kelas untuk siswa kelas IX.

Secara keseluruhan, sekolah telah menyediakan fasilitas dasar pembelajaran dan kebersihan, namun masih perlu peningkatan baik dalam kuantitas maupun pemerataan distribusi sarana agar dapat menunjang kegiatan belajar secara optimal.

f) Visi dan Misi SMP N 62 Muaro Jambi

SMP Negeri 62 Muaro Jambi memiliki visi yang jelas, yaitu "Menghasilkan lulusan yang unggul, beriman, dan mandiri." Visi ini menggambarkan tujuan utama sekolah dalam menciptakan generasi muda yang tidak hanya berkualitas dalam hal akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu mandiri dalam menghadapi tantangan hidup.

Untuk mewujudkan visi tersebut, sekolah telah merumuskan misi yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Adapun misi SMP N 62 Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan murid dengan profil pelajar pancasila yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.
2. Menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan meningkatkan kompetensi peserta didik yang mampu memfasilitasi peserta didik sesuai bakat dan minatnya dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi.
3. Meningkatkan manajemen satuan pendidikan yang adaptif, berkarakter, dan menjamin mutu
4. Menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, ketrampilan, dan pengembangan budaya lokal dalam kebhinekaan global
5. Menciptakan profil pelajar pancasila yang berkebhinnekaan Global, mandiri, bernalar kritis dan kreatif sehingga mampu mengkreasi ide dan keterampilan yang inovatif.
6. Menjamin hak belajar setiap anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berkebutuhan khusus (inklusi) dalam proses pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai gotong-royong.
7. Menciptakan partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam keberagaman yang mewadahi kreatifitas pelajar yang berjiwa kompetitif.

4.1.3 Studi Lapangan II

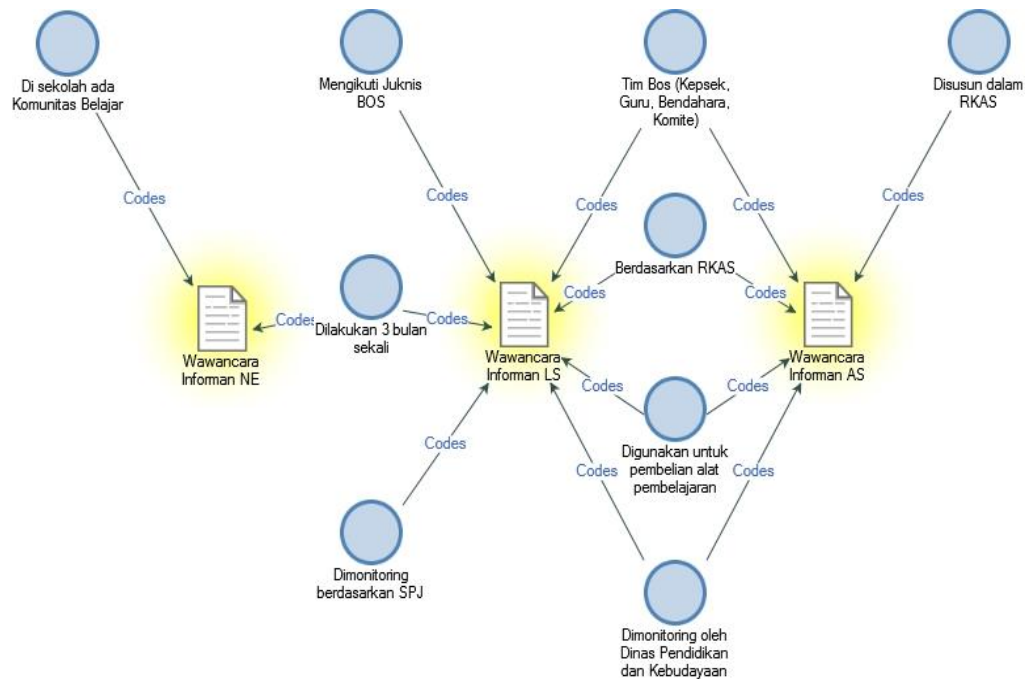
Tahap akhir dari kegiatan penelitian ini adalah Studi Lapangan II, yang berfungsi sebagai proses pendalaman data dan validasi temuan awal. Setelah data awal dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada

tahap sebelumnya, peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan klarifikasi terhadap informasi yang dirasa belum lengkap, ambigu, atau membutuhkan konfirmasi tambahan.

Wawancara lanjutan dilakukan secara mendalam terhadap informan kunci yang sebelumnya telah dipilih, seperti kepala sekolah, bendahara BOS, dan beberapa guru senior. Wawancara ini bertujuan untuk menindaklanjuti isu-isu yang muncul dari temuan awal, seperti kendala dalam pencairan dana, efektivitas program pelatihan guru, atau keterlibatan guru dalam penyusunan RKAS. Dengan menggunakan teknik probing, peneliti menggali jawaban yang lebih reflektif dan kontekstual dari informan.

4.2 Paparan Analisis Data

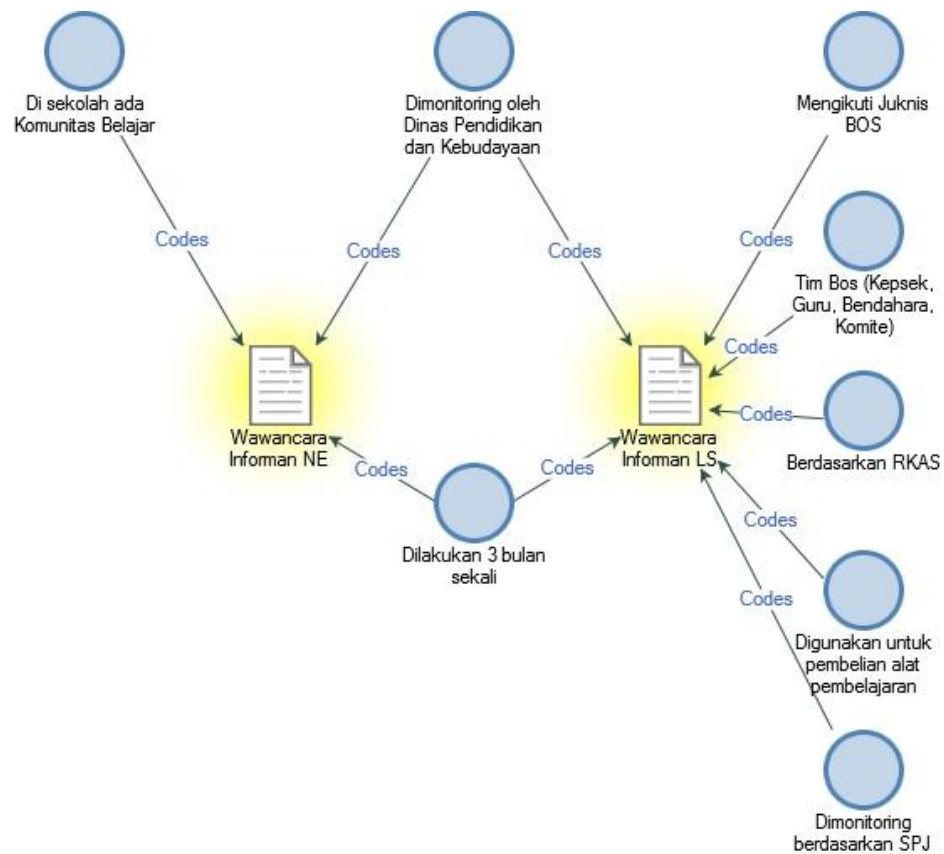
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo untuk membantu mengelola, mengkode, dan menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis mengikuti tahapan (Miles and Huberman 2014) yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data wawancara yang telah ditranskrip dimasukkan ke dalam NVivo. Peneliti kemudian melakukan proses open coding, yaitu pemberian label (kode) terhadap unit-unit makna dari narasi responden. Berikut visualisasi NVivo dari berbagai informan dan Kategori:



Gambar 4.2 Coding Informan Kunci Manajemen Dana BOS
 Sumber: Diolah oleh peneliti dengan NVIVO

Pada Gambar 4.2 Terlihat bahwa Peta kode ini menampilkan struktur tematik yang mengaitkan berbagai elemen wawancara dari tiga narasumber utama: guru, kepala sekolah, dan bendahara BOS. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap tiga informan utama (NE, LS, dan AS). Hasil analisis data dilakukan menggunakan metode *thematic coding*, yang divisualisasikan dalam bentuk pemetaan hubungan antar kode dan sumber data.

Berikut adalah gambar hasil analisis manajemen dana BOS ditinjau dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi:



Gambar 4.3 Coding Informan Kunci Analisis Manajemen Dana BOS dan Analisis Kinerja Guru

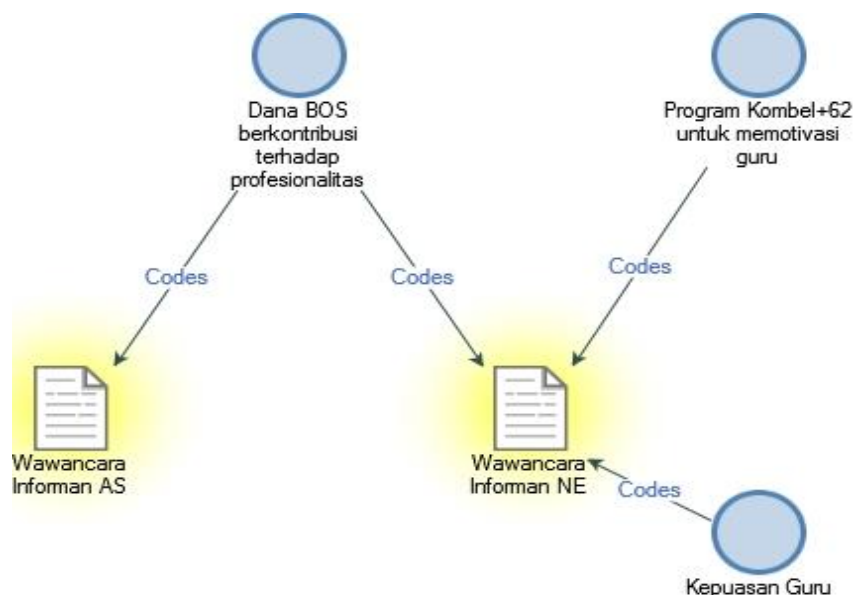
Sumber: Diolah oleh peneliti dengan NVIVO

Berdasarkan Gambar 4.3 Perencanaan penggunaan dana BOS telah disusun berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah melakukan perencanaan sesuai regulasi, sebagai dasar dalam penentuan alokasi dana. Pengorganisasian dilakukan melalui pembentukan Tim BOS yang melibatkan berbagai unsur sekolah: kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite sekolah. Ini mencerminkan adanya pembagian tugas yang jelas dan partisipatif dalam pengelolaan dana.

Dana BOS digunakan untuk kegiatan nyata seperti pengadaan alat pembelajaran, yang mendukung proses belajar mengajar. Kehadiran komunitas belajar juga menunjukkan adanya pelaksanaan program peningkatan kapasitas

guru atau pembelajaran kolaboratif, yang dibiayai atau difasilitasi melalui dana BOS. Terdapat sistem monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOS, baik oleh pihak internal maupun eksternal seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Evaluasi dilakukan secara periodik (setiap 3 bulan) dan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban (SPJ). Ini menunjukkan adanya kontrol administratif dan akuntabilitas. Manajemen dana BOS yang baik memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja guru secara komprehensif yakni adanya komunitas belajar di sekolah dan penggunaan dana BOS untuk pembelian alat penunjang pembelajaran.

Manajemen Dana BOS yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi guru untuk berkembang, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja mereka. Korelasi antara penggunaan dana yang tepat dan peningkatan kinerja guru dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 4.4 Coding Informan Kunci Manajemen Dana BOS untuk Peningkatan Kinerja Guru

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan NVIVO (2025)

Berdasarkan visualisasi hasil analisis kualitatif pada gambar, diperoleh pemetaan kode yang menunjukkan keterkaitan antara wawancara informan dengan tema-tema penting mengenai dampak dana BOS dan program pengembangan profesional guru. Analisis ini merefleksikan bagaimana intervensi kebijakan di tingkat sekolah memberikan kontribusi terhadap aspek profesionalitas dan motivasi tenaga pendidik.

Dalam wawancara dengan informan AS, muncul tema bahwa dana BOS berkontribusi terhadap profesionalitas guru. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana BOS tidak hanya digunakan untuk keperluan administratif dan operasional sekolah, tetapi juga memberikan dukungan nyata dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Kontribusi tersebut kemungkinan diwujudkan melalui pelatihan, penyediaan sarana pembelajaran, atau peningkatan kesejahteraan guru yang berdampak langsung pada penguatan kompetensi profesional.

Sementara itu, informan NE menyampaikan dua aspek penting. Pertama, senada dengan informan AS, ia juga mengakui bahwa dana BOS turut memperkuat profesionalitas guru. Kedua, ia menyinggung tentang adanya Program Kombel+62, yaitu program komunitas belajar yang dirancang untuk memotivasi guru, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan kerja guru. Adanya hubungan antara program komunitas belajar dan kepuasan guru menunjukkan pentingnya dukungan non-material (seperti lingkungan kolaboratif dan pengembangan karier) dalam meningkatkan semangat dan kinerja guru.

4.3 Temuan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan menyeluruh mengenai hasil penelitian tentang manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kinerja guru di SMPN 62 Muaro Jambi, disajikan ringkasan temuan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.2 Ringkasan Temuan Penelitian Manajemen Dana BOS dan Kinerja Guru di SMPN 62 Muaro Jambi

Aspek	Temuan Utama	Penjelasan
Perencanaan	Partisipatif dan Berbasis Kebutuhan	Disusun melalui RKAS tahunan, melibatkan kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite. Fokus pada kebutuhan prioritas: pembelajaran, pengembangan guru, dan sarana belajar.
Pengorganisasian	Struktur Jelas dan Inklusif	Terdapat tim BOS yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite. Guru diberi ruang menyampaikan usulan kebutuhan.
Pelaksanaan	Sistematis dan Transparan	Penggunaan dana sesuai RKAS: sarana-prasarana, pembelajaran, honorarium, ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran, dan pelatihan guru. Pelaporan dilakukan per triwulan.
Evaluasi	Rutin dan Terstruktur	Dilakukan setiap 3 bulan oleh sekolah dan Dinas Pendidikan. Menggunakan SPJ, Dapodik, ARKAS, forum reflektif guru. Fokus pada dampak terhadap mutu pendidikan.
Dampak Terhadap Guru	Peningkatan Kompetensi dan Motivasi	Dana BOS digunakan untuk pelatihan (Kombel+62, MGMP, literasi digital), pengadaan bahan ajar, honorarium, dan sarana ajar. Guru lebih semangat dan percaya diri.
Kepuasan Guru	Tinggi dan Produktif	Guru merasa dihargai, dilibatkan dalam RKAS, memiliki akses pelatihan, dan ruang refleksi pembelajaran. Terjadi peningkatan metode ajar dan kinerja.

4.3.1 Manajemen Dana BOS Ditinjau dari Aspek Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Evaluasi

Manajemen dana BOS di SMP Negeri 62 Muaro Jambi merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam mendukung kinerja guru. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mengidentifikasi bahwa

Manajemen dana BOS di sekolah ini mencerminkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap aspek tersebut dianalisis untuk memahami sejauh mana manajemen dana BOS dilakukan secara efektif dan bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan dan produktivitas guru di sekolah.

Temuan-temuan utama dari hasil wawancara menunjukkan bahwa manajemen dana BOS di sekolah dilaksanakan melalui proses yang sistematis dan terstruktur.

Pertama, dari wawancara dengan Informan NE, ditemukan bahwa sekolah memiliki komunitas belajar sebagai bagian dari penguatan kapasitas tenaga pendidik. Selain itu, NE menyebutkan bahwa evaluasi dan pelaporan terkait penggunaan dana BOS dilakukan secara berkala setiap tiga bulan, mencerminkan adanya upaya transparansi dan akuntabilitas. Aktivitas monitoring ini dilaksanakan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun sesuai ketentuan.

Sementara itu, Informan LS menekankan pentingnya mengikuti petunjuk teknis (juknis) BOS sebagai dasar dalam manajemen dana. LS juga menjelaskan bahwa perencanaan anggaran disusun dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), yang melibatkan tim pelaksana BOS yang terdiri dari unsur kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite sekolah. Informasi ini memperlihatkan bahwa manajemen dana BOS tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui tim yang memiliki peran dan tanggung jawab kolektif.

Selanjutnya, Informan AS memberikan penegasan bahwa penggunaan dana BOS diarahkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, terutama dalam bentuk pembelian alat pembelajaran. AS juga menyatakan bahwa pelaksanaan dan penggunaan dana ini dimonitoring langsung oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang memastikan kesesuaian antara penggunaan anggaran dan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya.

Secara keseluruhan, ketiga informan memberikan informasi yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, menggambarkan suatu sistem manajemen dana BOS yang bersandar pada prinsip perencanaan partisipatif (melalui RKAS), pelaksanaan berdasarkan petunjuk teknis, dan pengawasan berjenjang. Pola ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berfokus pada pemenuhan administratif, tetapi juga berusaha menjamin bahwa penggunaan dana benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Berikut uraian wawancara ketiga informan ditinjau dari berbagai aspek:

1) Perencanaan

Perencanaan penggunaan dana BOS ini disusun dalam Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) pada tiap tahunnya. Kemudian Kepala Sekolah SMP N 62 Muaro Jambi mengatakan bahwa:

“Dalam proses penyusunannya itu melibatkan tim BOS sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, bendahara dan komite sekolah dalam penyelesaiannya juga disesuaikan dengan kebutuhan yang menjadi prioritas sekolah tersebut” (informan AS)

Kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan rencana penggunaan dana BOS. Hal serupa juga telah diungkapkan oleh bendahara BOS dalam wawancara bersama peneliti:

“Dalam penyusunan RKAS yang terlibat yaitu ada kepala sekolah, bendahara, guru dan komite sekolah ini tergabung dalam tim BOS sekolah” (Informan LS)

Kepala sekolah, sebagai pemimpin utama, bertanggung jawab dalam menetapkan arah penggunaan dana sesuai dengan visi dan misi sekolah. Sebagaimana dijelaskan oleh (Supardi et al. 2024), kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan keterlibatan semua pihak terkait dalam proses perencanaan.

Bendahara sekolah berperan dalam menghitung dan menyusun anggaran berdasarkan hasil perencanaan yang telah disepakati. Keterlibatan bendahara dalam tahap ini penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana tercatat dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam wawancara dengan bendahara SMPN 62 Muaro Jambi, ia menjelaskan bahwa:

“Yang pertama itu harus mengikuti juknis bos yang berlaku dalam perencanaannya juga harus melibatkan tim bos sekolah, guru dan komite sekolah. untuk mencapai tujuan tertentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penggunaan dana BOS yang pertama itu menentukan komponen-komponen yang dirasa penting yang disesuaikan dengan kebutuhan yang menjadi prioritas sekolah yang kedua penggunaan dana BOS untuk kegiatan yang berorientasi kepada siswa maupun pengembangan kualitas gurunya selanjutnya penggunaan dana BOS juga dipergunakan untuk membeli

peralatan-peralatan yang sekiranya diperlukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran” (Informan LS).

Selain itu, komite sekolah yang terdiri dari perwakilan orang tua dan masyarakat juga dilibatkan dalam proses perencanaan. Komite sekolah berfungsi sebagai pengawas eksternal yang memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dalam konteks Manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 62 Muaro Jambi, pendekatan partisipatif menjadi elemen kunci dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Mengacu pada teori manajemen partisipatif yang dikemukakan (Locke, 1986), keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan komitmen individu maupun kolektif dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, pelibatan guru, kepala sekolah, dan staf terkait dalam perencanaan penggunaan dana BOS tidak hanya memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*), tetapi juga memperbesar peluang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara bersama.

Rencana penggunaan dana BOS di SMPN 62 Muaro Jambi disusun dengan merujuk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan fokus pada hasil. Perencanaan ini tidak hanya mencakup distribusi anggaran per kegiatan, tetapi juga menetapkan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Penetapan indikator ini menjadi sarana evaluatif untuk menilai sejauh mana alokasi dana benar-benar memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan di sekolah. Dengan kata lain, dana BOS tidak lagi

dipandang sekadar sebagai input finansial, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong perubahan positif dalam praktik pembelajaran dan manajemen sekolah.

Beberapa indikator keberhasilan utama yang dirumuskan mencakup tiga dimensi penting. Pertama, peningkatan kualitas pembelajaran, yang diukur melalui capaian hasil belajar siswa seperti nilai ujian tengah semester dan akhir semester, hasil penilaian harian, serta evaluasi berbasis proyek. Peningkatan ini menjadi indikator utama karena mencerminkan dampak langsung dari proses pembelajaran yang didukung oleh dana BOS.

Kedua, peningkatan fasilitas pembelajaran, yang mencakup pengadaan peralatan laboratorium, media pembelajaran digital, buku referensi tambahan, serta perbaikan infrastruktur ruang belajar. Data observasi menunjukkan bahwa keberadaan sarana yang memadai sangat berkontribusi terhadap kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar, terutama dalam mendorong pendekatan pembelajaran aktif dan kontekstual.

Ketiga, peningkatan kompetensi guru, yang diwujudkan melalui program pelatihan dan pengembangan profesional yang dibiayai dari dana BOS. Program pelatihan ini meliputi penguatan kompetensi pedagogik, penguasaan teknologi pendidikan, dan penerapan kurikulum merdeka belajar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam merancang dan menerapkan pembelajaran yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa.

Strategi ini sejalan dengan pendekatan *outcome-based budgeting* yang dijelaskan oleh (Gharib et al, 2024), di mana Manajemen dana publik difokuskan pada pencapaian hasil (*outcomes*), bukan sekadar realisasi anggaran. Dengan mengaitkan setiap pengeluaran dengan tujuan konkret yang terukur, manajemen dana BOS menjadi lebih terarah dan berorientasi pada perubahan nyata dalam kualitas pendidikan.

Penerapan prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa SMPN 62 Muaro Jambi sedang bergerak menuju tata kelola pendidikan yang lebih akuntabel dan berfokus pada dampak. Dalam jangka panjang, pola Manajemen seperti ini diharapkan dapat menjadi praktik baik (*best practice*) yang dapat ditiru oleh sekolah lain dalam mengelola dana BOS secara strategis dan berkelanjutan.

2) Pengorganisasian

Struktur organisasi Manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 62 Muaro Jambi dirancang untuk memastikan alokasi dana yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manajemen dana BOS di sekolah ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, mulai dari kepala sekolah hingga komite sekolah. Struktur organisasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dalam Manajemen dana BOS dan membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Perani and Banding 2024), struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang terperinci adalah

kunci keberhasilan Manajemen dana BOS. Struktur yang tepat dapat mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peruntukannya. Di SMPN 62 Muaro Jambi, struktur organisasi Manajemen dana BOS mencakup beberapa pihak yang saling berkolaborasi, yaitu kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan tim pengelola keuangan.

a. Kepala Sekolah

Kepala sekolah memegang peranan utama dalam Manajemen dana BOS di SMPN 62 Muaro Jambi. Sebagai pemimpin sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi penggunaan dana BOS sesuai dengan kebijakan pendidikan yang berlaku. Kepala sekolah juga bertugas memastikan bahwa penggunaan dana BOS mendukung visi dan misi sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Bendahara Sekolah

Bendahara sekolah memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam Manajemen dana BOS. Tugas utamanya adalah mengelola administrasi keuangan, mulai dari pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana BOS hingga penyusunan laporan keuangan yang transparan. Bendahara juga berperan dalam menyusun anggaran berdasarkan hasil rapat perencanaan yang melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah.

c. Komite Sekolah

Komite sekolah berfungsi sebagai pengawas eksternal yang memberi masukan dan memastikan bahwa Manajemen dana BOS dilakukan secara transparan dan akuntabel. Komite sekolah, yang terdiri dari perwakilan orang tua siswa dan masyarakat, memiliki hak untuk memantau penggunaan dana dan memberi masukan terkait kebutuhan yang mendesak di sekolah.

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan Manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah keterlibatan berbagai pihak terkait, termasuk guru, dalam proses perencanaan dan pengalokasian dana. Di SMPN 62 Muaro Jambi, peran serta guru dalam perencanaan dan pengalokasian dana BOS diakui sebagai salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, terutama untuk keperluan yang langsung mendukung proses pembelajaran.

Pengorganisasian merupakan tahap penting dalam siklus manajemen, di mana berbagai sumber daya, baik manusia maupun material, diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 62 Muaro Jambi, proses pengorganisasian diawali dengan pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan melalui forum diskusi dan musyawarah internal sekolah. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan budaya partisipatif dan kolaboratif dalam pengambilan keputusan.

Perencanaan penggunaan dana BOS di sekolah ini dimulai dari forum diskusi yang melibatkan kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dan para guru. Dalam wawancara dengan kepala sekolah, dijelaskan bahwa guru-guru diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan yang mereka anggap mendesak, terutama yang berkaitan langsung dengan aktivitas pengajaran. Guru tidak hanya hadir sebagai penerima kebijakan, melainkan sebagai mitra aktif dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS). Misalnya, dalam forum tersebut, guru mengusulkan pembelian berbagai alat bantu pembelajaran seperti buku referensi tambahan, proyektor, dan perangkat komputer, yang dinilai krusial untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan kurikulum merdeka.

Lebih jauh, guru tidak hanya terlibat dalam diskusi umum, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam penyusunan rencana anggaran yang lebih rinci. Bendahara sekolah menjelaskan bahwa setiap guru, khususnya wali kelas dan koordinator mata pelajaran, diberi kesempatan untuk mengajukan proposal kebutuhan sarana prasarana yang relevan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas masing-masing. Proposal-proposal tersebut kemudian dianalisis dan dibahas secara kolektif dalam rapat perencanaan, sebelum diintegrasikan ke dalam RKAS dan diajukan ke dinas pendidikan untuk mendapatkan persetujuan.

Model pengorganisasian seperti ini mencerminkan prinsip desentralisasi pengambilan keputusan dalam manajemen sekolah, yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada pelaksana

teknis di lapangan, yakni para guru. Keterlibatan guru dalam proses ini memberikan dampak ganda: pertama, alokasi dana menjadi lebih efisien karena didasarkan pada kebutuhan riil di kelas, bukan sekadar asumsi manajerial. Kedua, guru merasa dihargai dan diakui perannya, yang berdampak positif terhadap motivasi kerja dan rasa tanggung jawab mereka dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan.

Fakta ini sejalan dengan temuan dalam literatur manajemen pendidikan yang menyebutkan bahwa pengorganisasian yang inklusif mampu meningkatkan efektivitas program sekolah secara keseluruhan. Ketika guru merasa memiliki suara dalam proses perencanaan, mereka cenderung lebih berkomitmen untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan. Hal ini juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, di mana kolaborasi antarpihak menjadi bagian dari budaya organisasi sekolah.

Secara keseluruhan, pengorganisasian Manajemen dana BOS di SMPN 62 Muaro Jambi menunjukkan praktik tata kelola yang baik, dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan efisiensi. Pendekatan ini dapat menjadi contoh bagaimana Manajemen dana publik di lingkungan pendidikan seharusnya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan kultural yang memengaruhi keberhasilan di lapangan.

3) Pelaksanaan

Penerapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 62 Muaro Jambi menunjukkan proses pelaksanaan yang sistematis, terencana, dan disesuaikan dengan kebutuhan riil sekolah. Pelaksanaan ini merupakan

tindak lanjut dari proses perencanaan partisipatif yang telah melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah. Fokus utama dari penggunaan dana BOS adalah mendukung kegiatan pendidikan yang telah dirancang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan mengedepankan efisiensi penggunaan anggaran dan pencapaian hasil yang maksimal.

Pelaksanaan dana BOS di sekolah ini mencakup berbagai sektor penting. Salah satu bidang prioritas adalah penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pembelajaran. Dana digunakan untuk pembelian alat bantu mengajar seperti LCD proyektor, perangkat komputer, speaker aktif, serta alat tulis kantor yang mendukung administrasi pembelajaran. Beberapa ruang kelas juga mendapatkan perbaikan minor, seperti penggantian papan tulis dan kipas angin, guna menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Langkah ini dilakukan berdasarkan usulan langsung dari guru melalui rapat perencanaan sebelumnya.

Selain sarana, dana BOS juga dialokasikan untuk kegiatan pembelajaran yang bersifat non-fisik namun sangat strategis. Misalnya, pendanaan untuk pelatihan guru, workshop pengembangan perangkat ajar, serta kegiatan remedial dan pengayaan untuk siswa. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi guru dan menunjang proses pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan kurikulum. Dalam wawancara dengan kepala sekolah, disebutkan bahwa pelaksanaan pelatihan didasarkan pada hasil

evaluasi kebutuhan guru dan diarahkan untuk memperkuat kurikulum merdeka dan pembelajaran berbasis digital.

Selanjutnya, dana BOS juga digunakan untuk pemberian honorarium kepada tenaga pengajar non-PNS, seperti guru honorer atau tenaga pendukung yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Honorarium ini merupakan bentuk dukungan terhadap keberlangsungan layanan pendidikan, terutama di sekolah yang masih kekurangan guru PNS. Dalam praktiknya, pemberian honor dilakukan secara transparan, berdasarkan daftar hadir dan tanggung jawab kerja yang tercatat dengan baik.

Semua proses pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap pengeluaran dicatat secara rinci oleh bendahara sekolah dan diawasi oleh kepala sekolah serta komite. Dokumentasi penggunaan dana juga dilaporkan secara berkala melalui sistem pelaporan online sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan. Penggunaan dana disesuaikan dengan pos-pos dalam RKAS dan direalisasikan berdasarkan urgensi dan ketersediaan anggaran setiap triwulan.

Pelaksanaan yang terencana seperti ini menunjukkan bahwa SMPN 62 Muaro Jambi tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga mengupayakan efektivitas dan relevansi penggunaan dana BOS terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Integrasi antara perencanaan yang inklusif dan pelaksanaan yang sistematis menciptakan siklus Manajemen dana yang berkelanjutan, profesional, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Penelitian oleh (Muhajir et al, 2023) menyebutkan bahwa penggunaan dana BOS yang efisien harus mengacu pada perencanaan yang matang, dengan memperhatikan kebutuhan yang paling mendesak dan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sejalan dengan ungkapan kepala sekolah mengenai pelaksanaan penggunaan dana BOS yakni:

“Pelaksanaan penggunaan dana BOS di sekolah ini berdasarkan RKAS yang sudah dirancang” (Informan AS)

Hal ini juga didukung oleh pernyataan bendahara BOS mengenai pelaksanaan penggunaan dana BOS yaitu:

“Pelaksanaan penggunaan dana BOS di SMP 62 Muaro Jambi dalam pelaksanaannya itu mengikuti perencanaan yang telah dilakukan” (Informan LS)

Adapun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) di SMP N 62 Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana BOS untuk Sarana dan Prasarana

Salah satu bidang utama yang mendapatkan alokasi dana BOS adalah sarana dan prasarana sekolah. Dana BOS digunakan untuk memperbaiki dan memperbaharui fasilitas yang ada, seperti ruang kelas, peralatan belajar, dan alat bantu pembelajaran. Dalam RKAS SMP N 62 Muaro Jambi Tahun 2024, tertera dana BOS tahun ini difokuskan untuk pengembangan perpustakaan, pengadaan buku teks untuk peserta didik, pengadaan buku utama untuk guru, pemeliharaan perangkat computer, pengadaan alat multimedia pembelajaran, pembelian alat tulis kantor dan lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan teori *manajemen fasilitas* yang diungkapkan oleh (Permana et al, 2025), yang menyatakan

bahwa penyediaan sarana dan prasarana yang memadai adalah hal penting untuk mendukung kualitas pembelajaran.

Bendahara sekolah juga menyebutkan dalam wawancara bahwa:

“Dana BOS digunakan untuk pembelian meja, kursi, dan alat peraga seperti proyektor dan papan tulis interaktif. Semua pengeluaran untuk sarana dan prasarana dicatat secara rinci dan dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan sekolah. Penggunaan dana ini sangat penting karena fasilitas yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk belajar dengan optimal” (Informan LS).

2. Penggunaan Dana BOS untuk Kegiatan Pembelajaran

Selain untuk sarana dan prasarana, dana BOS juga dialokasikan untuk kegiatan pembelajaran. Salah satu prioritas yang disebutkan dalam hasil wawancara dengan kepala sekolah adalah penggunaan dana BOS untuk pengadaan bahan ajar dan modul pembelajaran. Kepala sekolah menjelaskan bahwa:

“Dana ini digunakan untuk membeli buku, modul, dan alat bantu ajar lainnya yang dapat mendukung proses pembelajaran di kelas” (Informan AS).

Ini sejalan dengan teori *curriculum-based budgeting* yang dijelaskan oleh (Bawono, 2021), yang menyatakan bahwa penggunaan dana untuk meningkatkan kualitas bahan ajar adalah investasi yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan.

3. Penggunaan Dana BOS untuk Honorarium

Penggunaan dana BOS di SMPN 62 Muaro Jambi juga mencakup pemberian honorarium untuk tenaga pengajar dan staf pendukung lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan motivasi dan kesejahteraan para guru

tetap terjaga. Menurut penelitian oleh (Khasanah et al. 2024), pemberian honorarium yang adil kepada tenaga pendidik dapat meningkatkan kinerja mereka dan pada akhirnya berdampak positif pada kualitas pembelajaran.

Dalam RKAS dijelaskan bahwa dana BOS digunakan untuk membayar honorarium bagi guru, pelatih drumband, pelatih kegiatan kepramukaan dan honor tenaga ahli dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan komunitas belajar guru. Honorarium ini penting untuk mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran, terutama di saat keterbatasan anggaran dari sumber lain.

4. Penggunaan Dana BOS untuk Kegiatan Ekstrakurikuler dan Pengembangan Siswa

Selain kegiatan utama pembelajaran, dana BOS juga dialokasikan untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan karakter siswa. SMPN 62 Muaro Jambi menggunakan dana BOS untuk mendanai berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, kepramukaan dan lomba akademik. Kegiatan ini penting untuk membantu siswa mengembangkan bakat dan minat mereka di luar jam pelajaran formal.

5. Penggunaan Dana BOS untuk Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran adalah salah satu elemen penting dalam proses pendidikan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan untuk mengetahui tingkat pemahaman serta perkembangan siswa (Magdalena et al. 2023). Dana BOS bisa digunakan untuk mendukung kegiatan evaluasi pembelajaran seperti yang tercantum dalam RKAS yaitu

pengadaan alat evaluasi, pelatihan penggunaan instrumen evaluasi, pengembangan bank soal, umpan balik untuk siswa.

6. Penggunaan Dana BOS untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Di SMPN 62 Muaro Jambi, selain bahan ajar, dana BOS juga digunakan untuk mengadakan pelatihan bagi para guru. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme pengajaran mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh Guru:

“Disekolah ada Kelompok belajar atau disebut Kombel+62 yang kami lakukan 2 kali dalam sebulan dan setiap hari seninnya di 1 jam terakhir hingga selesai. Supervisi atau di sebut Observasi kelas rutin dilakukan setiap semester dengan menilai metode mengajar serta kelengkapan administrasi guru dalam mengajar. Dampaknya saya jadi banyak teman untuk betukar informasi terkait pelajaran, berbagai pengalaman dan lebih semangat dalam peningkatan kinerja saya” (Informan NE).

Penggunaan Dana BOS untuk pendidik dan tenaga kependidikan sangat penting untuk menunjang kualitas pembelajaran (Fatonah 2021). Beberapa cara dana BOS dapat digunakan untuk mendukung pendidik dan tenaga kependidikan yaitu pelatihan dan pengembangan profesional, pengadaan buku dan referensi, insentif dan tunjangan, program kesejahteraan pendidik, peningkatan kualitas tenaga kependidikan, pengembangan tim kerja (Mulyasa 2022).

4) Evaluasi

Evaluasi terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan tahap krusial dalam siklus manajemen keuangan sekolah. Di SMPN 62 Muaro Jambi, proses evaluasi dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan bahwa penggunaan dana benar-benar

mendukung pencapaian tujuan pendidikan serta sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam Manajemen dana publik di lingkungan sekolah. Evaluasi terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan (Turambi, 2024). Di SMPN 62 Muaro Jambi, evaluasi dilakukan secara rutin dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dalam Manajemen dana BOS, seperti kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan tim pengelola keuangan. Kepala sekolah menerangkan bahwa:

“Evaluasi penggunaan dana BOS diaudit oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan” (Informan AS).

Sejalan dengan yang diungkapkan kepala sekolah SMP N 62 Muaro Jambi, bendahara BOS juga menyatakan bahwa:

“Evaluasi penggunaan dana BOS itu di monitoring oleh kepala sekolah dan tim manajemen bos serta dievaluasi oleh dinas pendidikan kabupaten Muaro Jambi” (Informan LS)

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana dana BOS yang diterima dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah serta untuk memperbaiki dan mengoptimalkan penggunaan dana di masa mendatang. Proses evaluasi di SMPN 62 Muaro Jambi dimulai dengan pengumpulan data mengenai penggunaan dana BOS sepanjang periode yang ditetapkan, yang mencakup rincian pengeluaran

untuk sarana prasarana, kegiatan pembelajaran, honorarium, dan pengembangan siswa. Dalam wawancara dengan bendahara sekolah, ia menjelaskan bahwa:

“Pengawasan dan monitoring ini dilakukan dalam 3 bulan sekali di mana sekolah harus memberikan laporan terhadap keuangan yang telah dilakukan selama 3 bulan tersebut” (Informan LS).

Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk utama, yaitu evaluasi administratif dan evaluasi substantif. Evaluasi administratif berfokus pada aspek kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi, seperti kesesuaian penggunaan dana dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), kelengkapan bukti pengeluaran, serta ketepatan pelaporan ke sistem Dapodik dan ARKAS. Proses ini dikawal oleh bendahara BOS dan diverifikasi oleh kepala sekolah serta komite sekolah secara berkala, biasanya setiap akhir triwulan. Pemeriksaan laporan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara realisasi anggaran dan pencapaian kegiatan.

Sementara itu, evaluasi substantif dilakukan untuk menilai sejauh mana penggunaan dana BOS memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, indikator yang digunakan mencakup peningkatan hasil belajar siswa, pemanfaatan sarana pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru. Misalnya, jika dana digunakan untuk pengadaan proyektor dan perangkat digital, maka evaluasi dilakukan dengan cara mengamati sejauh mana alat tersebut benar-benar digunakan dalam proses pembelajaran, serta apakah penggunaannya

meningkatkan interaksi dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.

Selain melalui observasi langsung, evaluasi juga dilakukan melalui forum reflektif internal, di mana para guru menyampaikan umpan balik mengenai kebermanfaatan kegiatan yang telah didanai. Dalam wawancara dengan beberapa guru, mereka menyatakan bahwa evaluasi semacam ini membantu dalam mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya, seperti kurangnya pelatihan penggunaan teknologi atau keterlambatan distribusi alat pembelajaran. Masukan ini kemudian dijadikan dasar untuk penyesuaian anggaran pada periode berikutnya, sehingga proses evaluasi juga berfungsi sebagai mekanisme perencanaan ulang yang berbasis data (*evidence-based planning*).

Komite sekolah turut memainkan peran penting dalam proses evaluasi sebagai representasi masyarakat. Keterlibatan mereka menjadi jaminan transparansi publik, karena setiap hasil evaluasi disampaikan melalui laporan rutin dan dibuka dalam rapat-rapat sekolah bersama wali murid. Ini selaras dengan prinsip good governance, di mana Manajemen dana publik harus terbuka dan akuntabel.

Pengumpulan data ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui. Evaluasi dilakukan melalui rapat yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah. Dalam rapat evaluasi tersebut, mereka akan membahas pencapaian dari indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya,

seperti efektivitas penggunaan dana dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan fasilitas sekolah.

“Pengawasan dan monitoring dilakukan berdasarkan dari SPJ yang telah dilaporkan” (Informan LS).

Hasil dari evaluasi ini akan digunakan untuk mengetahui apakah tujuan yang diharapkan tercapai atau ada kekurangan dalam penggunaan dana BOS yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan analisis tematik terhadap data wawancara dari guru, kepala sekolah, dan bendahara BOS, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat satuan pendidikan. Proses ini mencerminkan fungsi manajerial yang sistematis, dimulai dari perencanaan, di mana penggunaan dana BOS disusun secara konsisten dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Seluruh narasumber menegaskan bahwa RKAS menjadi acuan utama dalam mengarahkan Manajemen anggaran, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah. Keterlibatan kolektif ini mencerminkan proses pengorganisasian yang inklusif, yang memastikan bahwa tanggung jawab dan kewenangan dalam Manajemen dana dibagi secara proporsional melalui pembentukan tim BOS yang beranggotakan unsur-unsur strategis sekolah.

Tahapan pelaksanaan dana BOS terlihat dari penggunaannya yang difokuskan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, seperti pengadaan alat ajar, serta pelaksanaannya yang merujuk secara ketat pada petunjuk teknis

(juknis) yang berlaku. Pelaksanaan ini juga menunjukkan bahwa sekolah memiliki orientasi terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan melalui Manajemen sumber daya keuangan yang terencana dan terarah. Aspek evaluasi tercermin dari adanya mekanisme monitoring yang dilakukan secara rutin oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta sistem pertanggungjawaban yang berbasis dokumen SPJ. Evaluasi ini dilakukan secara berkala, yaitu setiap tiga bulan, untuk memastikan bahwa Manajemen dana berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa dana BOS tidak hanya memenuhi unsur kepatuhan administratif, tetapi juga mengadopsi prinsip *good governance* dalam pendidikan, yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, tata kelola dana BOS di sekolah dapat dipandang sebagai bentuk penerapan manajemen pendidikan yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.

4.3.2 Analisis Manajemen Dana BOS

Dalam pelaksanaan Manajemen dana BOS di SMP Negeri 62 Muaro Jambi, ditemukan sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas penyaluran dan pemanfaatan dana, seperti keterlambatan pencairan, prosedur administrasi yang rumit, dan kurangnya pelatihan teknis bagi pengelola dana. Meskipun demikian, pihak sekolah telah mengambil berbagai langkah solutif guna mengatasi kendala-kendala tersebut agar tidak menghambat program peningkatan mutu pendidikan, khususnya yang

menyasar kinerja guru. Berdasarkan hasil analisis data wawancara dari beberapa informan (NE, LS, dan AS), diperoleh temuan penting yang menunjukkan adanya sejumlah kendala dalam Manajemen dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dua isu utama yang mencuat dalam temuan ini adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan dan kesulitan dalam Manajemen dana BOS. Kedua isu ini saling berkaitan dan memiliki implikasi terhadap efektivitas tata kelola keuangan sekolah.

Permasalahan transparansi diangkat oleh informan NE yang mengungkapkan bahwa laporan keuangan sekolah cenderung tidak terbuka dan sulit diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini menyebabkan munculnya rasa curiga serta rendahnya kepercayaan publik terhadap Manajemen dana BOS. Kondisi ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas dalam sistem pelaporan keuangan yang masih bersifat manual dan konvensional.

Sebagai solusi terhadap masalah ini, informan LS menyarankan penyederhanaan laporan keuangan melalui sistem digital. Digitalisasi dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keterbukaan, memudahkan akses data, serta mempercepat proses pelaporan. Melalui sistem digital, pelaporan keuangan dapat disusun secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung terciptanya transparansi dan pengawasan yang lebih efektif.

Hubungan antara "laporan kurang transparan" dan "penyederhanaan laporan melalui sistem digital" memperlihatkan bahwa digitalisasi dapat

menjadi solusi potensial atas kendala transparansi. Ini menunjukkan pentingnya modernisasi sistem pelaporan untuk menjawab tantangan tata kelola keuangan di sekolah.

Masalah lain yang mencuat dari wawancara dengan informan AS adalah kesulitan yang dihadapi oleh pengelola dana BOS dalam menjalankan tugasnya. Kesulitan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pembinaan rutin bagi kepala sekolah, bendahara, dan staf administrasi lainnya. Kurangnya pemahaman teknis dalam Manajemen dana menyebabkan berbagai hambatan, seperti kesalahan administratif, pengalokasian dana yang tidak tepat sasaran, hingga keterlambatan dalam pelaporan.

Untuk mengatasi persoalan ini, disarankan adanya pelatihan dan pembinaan secara berkala. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan Manajemen dana BOS dapat dilakukan secara lebih profesional dan akuntabel.

Selain itu, ditemukan pula adanya kelemahan dalam koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam Manajemen dana, seperti kepala sekolah, komite sekolah, dan instansi terkait. Informan AS menyampaikan bahwa komunikasi antar pihak sering kali tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan miskomunikasi dan ketidaksinkronan dalam perencanaan dan pelaporan keuangan.

Sebagai solusi, penguatan koordinasi perlu dilakukan melalui optimalisasi peran komite sekolah. Komite sekolah memiliki peran strategis

dalam mendampingi dan mengawasi proses Manajemen dana, serta menjembatani antara sekolah dan masyarakat. Keterlibatan aktif komite sekolah dapat menjadi penguat dalam menciptakan sistem Manajemen yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Selain itu, sekolah juga melakukan evaluasi berkala atas program yang dibiayai BOS, termasuk mendengarkan masukan dari guru-guru pelaksana. Dari evaluasi tersebut, sekolah dapat menentukan program mana yang perlu disesuaikan atau dihilangkan karena tidak relevan atau tidak memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja guru.

Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, SMPN 62 Muaro Jambi mampu mengelola dana BOS secara lebih efektif dan akuntabel, serta menjaga agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memegang peranan penting dalam mendukung berbagai kegiatan pendidikan di sekolah, termasuk di SMPN 62 Muaro Jambi. Meskipun dana BOS ditujukan untuk mendanai kegiatan operasional sekolah, dalam praktiknya, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pihak sekolah, baik dari segi administrasi, teknis, maupun pemahaman tentang tata kelola dana yang tepat. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, dan pengelola dana BOS, ditemukan beberapa masalah utama yang dihadapi dalam Manajemen dana BOS di SMPN 62 Muaro Jambi, seperti kurangnya dana, keterlambatan pencairan dana, kurangnya pemahaman pengelola dana, dan

hambatan administratif yang mempengaruhi kelancaran penggunaan dana. Masalah-masalah yang timbul dalam Manajemen dana BOS di SMPN 62 Muaro Jambi menghambat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Kepala sekolah mengatakan:

“Dana BOS disesuaikan dengan jumlah siswa, sehingga dana yang diterima sedikit” (Informan AS).

Pernyataan Kepala Sekolah tersebut menjelaskan bahwa tim manajemen BOS mengalami kesulitan dalam mengelola dana BOS. Guru juga menjelaskan bahwa:

“Harapan saya kedepannya lebih transparan lagi dan pemanfaatannya lebih efektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Manajemen BOS di Sekolah saya sudah bagus namun lebih ditingkatkan lagi dan lebih transparan lagi seperti menyusun RKAS yang lebih terperinci dengan prioritas untuk peningkatan kualitas pembelajaran.” (Informan NE).

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam Manajemen dana BOS, pihak SMPN 62 Muaro Jambi telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memperbaiki administrasi, koordinasi, dan pelaporan dana BOS. Beberapa upaya perbaikan yang dilakukan antara lain:

1. Upaya Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOS

Salah satu langkah utama yang diambil oleh SMPN 62 Muaro Jambi untuk mengatasi masalah dalam Manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dengan menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan rutin bagi pengelola dana, seperti bendahara dan kepala sekolah. Melalui wawancara dengan kepala sekolah, terungkap bahwa pihak sekolah menyadari bahwa kurangnya pemahaman tentang prosedur penggunaan dan

pertanggungjawaban dana BOS merupakan salah satu kendala yang memengaruhi efektivitas Manajemen dana tersebut.

Kepala sekolah menjelaskan bahwa meskipun dana BOS memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang kegiatan pendidikan, prosedur penggunaan dan pelaporan dana BOS sering kali dianggap rumit, sehingga mempengaruhi akurasi Manajemen anggaran. Salah satu faktor yang menyumbang pada kendala ini adalah kurangnya pengetahuan tentang aturan yang berlaku, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengalokasian dana, penundaan pencairan, serta ketidakakuratan dalam laporan keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak sekolah telah berupaya dengan menyediakan pelatihan secara rutin, baik secara internal (oleh pihak sekolah sendiri) maupun eksternal (dari lembaga-lembaga yang memiliki keahlian dalam Manajemen dana BOS). Pelatihan yang diberikan tidak hanya mencakup aspek teknis dalam Manajemen dana seperti pengalokasian, pencairan, dan penggunaan dana, tetapi juga membahas prosedur pembuatan laporan keuangan yang jelas dan akuntabel. Pemahaman yang baik tentang cara menyusun laporan keuangan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selain itu, pelatihan juga berfokus pada pemahaman tentang perubahan kebijakan yang terkait dengan dana BOS, mengingat bahwa

regulasi yang mengatur penggunaan dana BOS sering mengalami pembaruan. Ketidakpahaman terhadap perubahan kebijakan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam Manajemen dana, yang berpotensi merugikan sekolah baik dari sisi administrasi maupun akuntabilitas.

Dengan adanya pelatihan rutin ini, pihak sekolah berharap agar pengelola dana BOS dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang regulasi dan prosedur yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk membangun kapasitas pengelola dana agar mereka dapat mengelola dana dengan lebih profesional, efisien, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas Manajemen dana dan dampaknya terhadap proses pendidikan di sekolah.

Melalui langkah ini, diharapkan dapat mengurangi kesalahan administratif yang terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang prosedur yang benar, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap manajemen dana BOS di sekolah. Hal ini juga akan menciptakan Manajemen dana BOS yang lebih transparan dan berorientasi pada hasil, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik.

2. Penyederhanaan Prosedur Administrasi

Untuk mengatasi hambatan administratif yang sering muncul dalam Manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pihak SMPN 62 Muaro Jambi telah mengambil langkah-langkah strategis dengan penyederhanaan prosedur administrasi. Hal ini dilakukan agar proses Manajemen dana BOS dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan akuntabel,

tanpa menambah beban administratif bagi pengelola dana.

Salah satu langkah awal yang diambil adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan dan alokasi dana yang lebih terperinci di awal tahun ajaran. Proses ini dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari kepala sekolah, bendahara, hingga para guru, untuk merumuskan kebutuhan dana yang lebih jelas dan sesuai dengan prioritas yang ada. Dengan pendekatan ini, proses pengajuan anggaran menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, mengurangi kebingungan yang mungkin terjadi dalam perencanaan anggaran dan alokasi dana untuk berbagai kegiatan pendidikan.

Bendahara sekolah mengungkapkan dalam wawancara bahwa sistem digital kini digunakan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, yang secara signifikan mempermudah Manajemen dana. Penerapan sistem digital ini bukan hanya menyederhanakan prosedur administrasi, tetapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam proses pencatatan manual yang sebelumnya menjadi salah satu kendala utama. Dengan sistem digital, setiap transaksi dan pengeluaran dapat tercatat secara otomatis, meminimalkan human error, dan memudahkan dalam pemantauan serta pelaporan keuangan yang lebih tepat waktu.

Selain itu, pihak sekolah juga menyederhanakan format pelaporan keuangan agar lebih mudah disusun dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Meskipun format ini lebih sederhana, pihak sekolah memastikan bahwa standar akuntabilitas tetap terpenuhi. Format pelaporan yang sederhana ini memudahkan pengelola dana BOS dalam menyusun laporan

yang jelas, terstruktur, dan mudah diverifikasi, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dalam proses evaluasi dan pertanggungjawaban.

Keuntungan dari penyederhanaan prosedur ini sangat signifikan. Selain mempercepat proses administrasi dan pelaporan, pendekatan ini juga memungkinkan pengelola dana untuk lebih fokus pada penggunaan dana yang efektif, alih-alih terjebak dalam kesulitan administratif. Penyederhanaan prosedur juga mempercepat proses evaluasi dan pertanggungjawaban, yang penting dalam memastikan bahwa dana BOS digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya langkah-langkah ini, SMPN 62 Muaro Jambi tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam Manajemen dana BOS. Hal ini memberikan kepercayaan lebih besar kepada semua pihak terkait, termasuk orang tua siswa dan masyarakat, bahwa dana yang diberikan kepada sekolah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Penguatan Koordinasi Antar Pihak Terkait

Salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam Manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 62 Muaro Jambi adalah koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam Manajemen dana. Kepala sekolah SMPN 62 Muaro Jambi menyatakan bahwa koordinasi yang efektif antara kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama.

Koordinasi antar pihak menjadi kunci untuk menciptakan kesinambungan dan efisiensi dalam Manajemen dana. Kepala sekolah menjelaskan bahwa tanpa komunikasi yang jelas dan terus-menerus, sangat mungkin terjadi kesalahan dalam pengalokasian dana atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Dalam beberapa kasus sebelumnya, beberapa kebingungan dan kesalahan dalam penggunaan dana BOS disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan keselarasan antara pihak-pihak terkait. Untuk itu, pihak sekolah berusaha membangun komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan, baik dalam rapat koordinasi maupun dalam pembahasan rutin mengenai kebutuhan dana.

Selain itu, sekolah juga mengoptimalkan peran komite sekolah sebagai salah satu pihak yang sangat penting dalam Manajemen dana BOS. Komite sekolah tidak hanya berfungsi sebagai penyokong dan pengawas, tetapi juga sebagai penyumbang ide terkait prioritas penggunaan dana. Pihak komite sekolah memberikan masukan yang sangat berharga mengenai kebutuhan mendesak yang mungkin tidak tercakup dalam rencana awal. Misalnya, jika ada kebutuhan mendesak dalam pembelian alat pembelajaran atau peningkatan fasilitas sekolah yang belum terprediksi, komite sekolah dapat memberikan saran prioritas yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan dana.

Peran komite sekolah ini memberikan keuntungan besar bagi sekolah karena dengan adanya kontribusi dari berbagai pihak, keputusan yang diambil akan lebih transparan dan terbuka. Dengan melibatkan komite

sekolah, proses pengambilan keputusan menjadi lebih partisipatif, mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan pendidikan. Hal ini menciptakan rasa kepercayaan di kalangan semua pemangku kepentingan, termasuk para guru, orang tua, dan masyarakat sekitar, bahwa penggunaan dana BOS dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban dan berdasarkan kepentingan bersama.

Koordinasi yang baik ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kesalahan dalam Manajemen dana, yang sering kali dapat terjadi akibat komunikasi yang kurang baik atau pengambilan keputusan sepihak. Dengan Manajemen yang lebih terkoordinasi, diharapkan sekolah dapat mencapai tujuan penggunaan dana BOS yang lebih efisien, lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan, dan tentunya lebih transparan.

Pada akhirnya, koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait di SMPN 62 Muaro Jambi bukan hanya akan mengoptimalkan penggunaan dana, tetapi juga membangun kepercayaan yang lebih besar di antara semua pihak yang terlibat, baik di tingkat internal sekolah maupun dengan masyarakat sekitar.

4. Perbaikan dalam Sistem Pelaporan Dana BOS

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pihak SMPN 62 Muaro Jambi melakukan perbaikan signifikan pada sistem pelaporan keuangan. Sebelumnya, laporan keuangan yang disusun secara manual memakan waktu yang cukup lama dan rentan terhadap kesalahan administratif. Hal ini

sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan dan memperbesar potensi ketidaksesuaian dalam pencatatan keuangan, yang tentunya dapat mengganggu proses evaluasi dan audit.

Namun, dengan sistem digitalisasi untuk pelaporan dana BOS, pihak sekolah berhasil mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan efisiensi dalam Manajemen dana. Bendahara sekolah menjelaskan bahwa sistem baru ini mempermudah mereka dalam menyusun laporan keuangan yang lebih cepat dan akurasi. Sistem digital ini memungkinkan setiap transaksi tercatat secara otomatis, memudahkan dalam proses rekonsiliasi data, dan mempercepat penyusunan laporan keuangan yang diperlukan tanpa mengorbankan kualitas dan ketepatan data.

Dengan digitalisasi, setiap pihak yang terlibat dalam Manajemen dana BOS termasuk kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah dapat mengakses laporan keuangan dengan lebih mudah dan cepat. Akses yang lebih terbuka dan transparan ini mempermudah pihak-pihak terkait untuk memantau penggunaan dana secara real-time, mengidentifikasi potensi masalah lebih awal, dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah disusun.

Lebih lanjut, keberadaan sistem digital ini juga membawa dampak positif terhadap proses audit yang lebih mudah. Sebelumnya, proses audit yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dapat terkendala oleh ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pencatatan manual. Namun, dengan laporan yang terstruktur dan lebih terintegrasi dalam sistem digital, audit

menjadi lebih transparan dan efisien, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi yang mungkin terjadi.

Bendahara sekolah menambahkan bahwa, selain mempermudah pelaporan, penggunaan sistem digital ini juga memungkinkan mereka untuk lebih terorganisir dalam hal penyimpanan data. Dokumentasi yang lebih rapi dan terkonsolidasi menjadikan setiap laporan lebih mudah diakses saat dibutuhkan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam proses evaluasi dan perencanaan di masa depan.

Dengan perbaikan sistem pelaporan dana BOS melalui digitalisasi, SMPN 62 Muaro Jambi tidak hanya berhasil mengatasi masalah administratif yang sebelumnya menjadi hambatan, tetapi juga meningkatkan tingkat kepercayaan dari semua pihak terkait, termasuk masyarakat, orang tua, dan pihak berwenang. Transparansi yang lebih tinggi ini menjamin bahwa dana BOS yang diterima sekolah digunakan secara efektif dan akuntabel, sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan

4.3.3 Analisis Kinerja Guru

Kinerja guru di SMPN 62 Muaro Jambi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mendukung, baik dari sisi kebijakan sekolah, program pembinaan, maupun dukungan dana yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Kombel+62* atau *Kelompok belajar Plus 62 (Pendidikan yang lebih unggul dan bersinergi)*, sebuah program kelompok belajar guru yang dilaksanakan secara rutin dua kali sebulan, memberikan dampak signifikan

terhadap peningkatan kompetensi dan motivasi guru.

“Di sekolah ada Kelompok belajar atau disebut Kombel+62 yang kami lakukan 2 kali dalam sebulan dan setiap hari seninnya di 1 jam terakhir hingga selesai. Dan Supervisi atau di sebut Observasi kelas rutin dilakukan setiap semester dengan menilai metode mengajar serta kelengkapan administrasi guru dalam mengajar (Informan NE).

Program ini tidak hanya menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam mengajar, tetapi juga membangun semangat kolaboratif di antara guru, yang pada gilirannya mendorong peningkatan kinerja mereka.

Selain program *Kombel+62*, sekolah juga melaksanakan supervisi akademik yang dilakukan secara rutin setiap semester. Proses supervisi ini dilaksanakan dalam beberapa tahap yang sistematis, dimulai dari perencanaan, observasi kelas, penilaian kinerja, pemberian umpan balik, hingga refleksi dan tindak lanjut jika guru membutuhkan pembinaan lebih lanjut. Evaluasi yang dilakukan melalui supervisi ini tidak hanya berfokus pada penilaian, tetapi lebih kepada pembinaan dan perbaikan yang bersifat konstruktif. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen sekolah berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pengajaran dengan cara yang tidak hanya menilai, tetapi juga mendukung guru dalam mengembangkan keterampilan mereka.

Dukungan dana BOS juga sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan *Kombel+62*, pengadaan buku pelajaran, alat peraga, dan bahan ajar yang sangat membantu dalam meningkatkan kualitas

pembelajaran. Selain itu, dana BOS juga digunakan untuk mendukung biaya transportasi bagi guru yang mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), yang memungkinkan guru untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terkini dalam bidang pengajaran mereka. Dengan adanya dana tersebut, guru merasa lebih termotivasi dan terdorong untuk terus mengembangkan kompetensinya.

“Dana BOS berkontribusi terhadap pengembangan profesionalisme guru seperti membiayai Kombel+62, Buku atau sumber belajar tersedia dari dana BOS, Memberikan transport bagi guru-guru untuk mengikuti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)” (Informan NE).

Guru juga merasa bahwa manajemen sekolah telah memberikan dukungan yang cukup untuk peningkatan kinerja mereka. Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk pelatihan dan kegiatan pembinaan, tetapi juga dalam menciptakan suasana kerja yang mendukung dan memungkinkan guru untuk berkolaborasi dengan sesama rekan guru. Hal ini membuktikan adanya upaya yang nyata dari pihak manajemen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan profesionalisme guru.

Namun, ada harapan dari guru agar pengelolaan dana BOS di masa depan dapat dilakukan dengan lebih transparan dan efektif. Para guru berharap agar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun lebih terperinci dan difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran. Mereka juga menginginkan agar pemanfaatan dana lebih difokuskan pada kebutuhan yang langsung berdampak pada pembelajaran dan pengembangan kompetensi guru.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja guru di SMPN 62 Muaro Jambi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh dukungan sistematis dari sekolah, kebijakan yang tepat, serta pemanfaatan dana yang strategis. Program pembinaan berbasis sekolah, dukungan dana BOS, dan evaluasi yang membina menjadi faktor penting yang mendukung profesionalisme guru dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

4.3.4 Manajemen Dana BOS untuk Meningkatkan Kinerja Guru di SMPN 62 Muaro Jambi

Manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 62 Muaro Jambi secara umum diarahkan untuk mendukung operasional pendidikan dan pengembangan mutu pembelajaran, khususnya dalam upaya peningkatan kinerja guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara BOS, dan beberapa guru, ditemukan bahwa dana BOS digunakan tidak hanya untuk kebutuhan administratif atau fisik, tetapi juga difokuskan pada peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru.

Secara akademis, temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan manajemen pendidikan tidak hanya ditentukan oleh aspek struktural dan administratif, tetapi juga sangat bergantung pada pendekatan holistik terhadap pengembangan sumber daya manusia, dalam hal ini guru. Dana BOS dan program-program pengembangan seperti *Kombel+62* secara sinergis memainkan peran penting dalam membangun atmosfer kerja yang mendukung, yang pada gilirannya akan berdampak pada mutu pendidikan di sekolah. Berikut pemaparan hasil wawancara ditinjau dari masing-masing

aspek:

1) Alokasi Dana BOS untuk Kinerja Guru

Salah satu fokus utama dalam Manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 62 Muaro Jambi adalah pengembangan kapasitas dan kualitas guru. Kesadaran bahwa kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kompetensi guru mendorong sekolah untuk mengalokasikan dana BOS secara signifikan ke arah peningkatan profesionalisme pendidik. Hal ini menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga strategis dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Dana BOS digunakan untuk menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan, workshop, dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata guru di lapangan. Kepala sekolah menjelaskan bahwa program pelatihan dirancang secara periodik dan berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan kompetensi guru. Salah satu fokus utama pelatihan adalah peningkatan kompetensi pedagogik, khususnya dalam mengelola pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan.

Pelatihan yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah pelatihan literasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi dan penerapan kurikulum merdeka yang mendorong pembelajaran berbasis proyek dan teknologi, guru dituntut untuk mampu mengintegrasikan perangkat digital seperti laptop, LCD proyektor,

aplikasi pembelajaran daring, dan media interaktif lainnya. Pelatihan ini mencakup penggunaan platform pembelajaran seperti Google Classroom, pembuatan soal ujian menggunakan Google Form, Canva for Education, serta teknik membuat materi ajar interaktif menggunakan PowerPoint atau video edukatif.

Selain aspek teknologi, dana BOS juga digunakan untuk mengadakan workshop penyusunan RPP dan modul ajar kreatif, serta pelatihan manajemen kelas. Tujuannya adalah agar guru mampu merancang pembelajaran yang tidak hanya berbasis konten, tetapi juga berbasis karakter dan kebutuhan individual siswa. Pelatihan ini biasanya melibatkan narasumber profesional, baik dari dinas pendidikan setempat maupun dari lembaga pelatihan guru yang memiliki reputasi nasional. Bendahara sekolah menjelaskan bahwa seluruh kegiatan ini direncanakan secara transparan, dengan estimasi biaya yang disesuaikan dengan batas penggunaan anggaran, serta pelaporan penggunaan dana yang tertib sesuai ketentuan.

Manfaat dari alokasi dana ini terlihat dalam perubahan sikap dan praktik mengajar para guru. Hasil observasi menunjukkan bahwa guru menjadi lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi, lebih bervariasi dalam metode mengajar, dan lebih terbuka terhadap kolaborasi antar guru. Selain itu, adanya pelatihan rutin juga menciptakan budaya belajar di kalangan tenaga pendidik, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas.

Dengan demikian, pengalokasian dana BOS untuk pengembangan kapasitas guru di SMPN 62 Muaro Jambi bukan hanya memenuhi aspek administratif penggunaan anggaran, tetapi juga secara nyata mendukung peningkatan mutu pendidikan. Strategi ini mencerminkan pendekatan yang progresif dan berkelanjutan dalam Manajemen dana sekolah, di mana dana tidak hanya dibelanjakan, tetapi benar-benar diinvestasikan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang paling menentukan dalam pendidikan.

2) Pengaruh Manajemen Dana BOS terhadap Kinerja Guru

Salah satu fokus utama dalam Manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 62 Muaro Jambi adalah pengembangan kapasitas dan kualitas guru. Kesadaran bahwa kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kompetensi guru mendorong pihak sekolah untuk mengalokasikan dana BOS secara signifikan guna mendukung peningkatan profesionalisme tenaga pendidik. Strategi ini tidak hanya relevan, tetapi juga strategis dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Dana BOS dimanfaatkan untuk menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan, *workshop*, dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan riil guru di lapangan. Kepala sekolah menyampaikan bahwa program pelatihan dirancang secara periodik dengan tujuan utama meningkatkan kompetensi

pedagogik, terutama dalam mengelola pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan.

Salah satu jenis pelatihan yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah pelatihan literasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Seiring dengan perkembangan teknologi dan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan digital, guru dituntut mampu mengintegrasikan perangkat digital seperti laptop, LCD proyektor, aplikasi pembelajaran daring, serta media interaktif lainnya. Materi pelatihan meliputi pemanfaatan platform seperti Google Classroom, pembuatan soal ujian menggunakan Google Form, Canva for Education, dan teknik pembuatan materi ajar interaktif melalui PowerPoint maupun video edukatif.

Di samping pelatihan berbasis teknologi, alokasi dana BOS juga digunakan untuk mendukung workshop penyusunan RPP, Pembuatan LKPD yang menarik dan modul ajar yang kreatif, serta pelatihan Manajemen kelas. Tujuannya adalah agar guru tidak hanya menguasai konten pembelajaran, tetapi juga mampu menyusun strategi pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individu siswa. Kegiatan pelatihan ini menghadirkan narasumber yang profesional, baik dari dinas pendidikan maupun dari lembaga pelatihan yang berpengalaman secara nasional.

Bendahara sekolah menambahkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pelatihan direncanakan secara transparan, dengan alokasi anggaran yang

disesuaikan dengan pagu dana yang tersedia. Pelaporan pelaksanaan dan penggunaan anggaran dilakukan secara tertib, mengacu pada ketentuan resmi yang berlaku.

Manfaat dari pengalokasian dana ini tampak nyata dalam praktik pembelajaran. Hasil observasi menunjukkan bahwa para guru menjadi lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi, menerapkan variasi metode pembelajaran, serta membangun kolaborasi antarguru yang lebih intensif. Selain itu, pelatihan yang berlangsung secara berkala turut membentuk budaya belajar di kalangan pendidik, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas interaksi belajar-mengajar di dalam kelas.

Hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa pelatihan yang mereka terima memiliki dampak langsung dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Dana BOS berkontribusi terhadap pengembangan profesionalisme guru seperti membiayai Kombel+62, Buku atau sumber belajar tersedia dari dana BOS, Memberikan transport bagi guru-guru untuk mengikuti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)” (Informan NE).

Seorang guru IPA, mengungkapkan bahwa setelah mengikuti pelatihan pada program ini dapat memotivasi dan menjadi pemecah masalah belajar.

“Program Kombel+62 rutin di lakukan setiap hari senin dalam sebulan 2 kali untuk memotivasi dan belajar bersama apa yang menjadi kesulitan dalam proses belajar mengajar” (Informan NE).

Peningkatan fasilitas yang didanai oleh dana BOS tidak hanya meningkatkan motivasi guru, tetapi juga berimbas pada peningkatan kinerja

mereka. Seperti yang dijelaskan oleh kepala sekolah, fasilitas yang lebih baik memungkinkan guru untuk lebih optimal dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran yang melibatkan teknologi. Ini juga memberi mereka kesempatan untuk mengeksplorasi metode pembelajaran yang lebih inovatif, yang pada akhirnya meningkatkan hasil pembelajaran siswa.

Penelitian oleh (Raberi, 2020) menunjukkan bahwa peningkatan sarana dan prasarana di sekolah, yang didukung oleh Manajemen dana BOS yang baik, dapat meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Peningkatan fasilitas memungkinkan guru untuk menerapkan teknik mengajar yang lebih bervariasi dan sesuai dengan perkembangan zaman, seperti penggunaan perangkat pembelajaran digital yang dapat membantu menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami siswa.

Dengan demikian, alokasi dana BOS untuk pengembangan kapasitas guru di SMPN 62 Muaro Jambi tidak hanya memenuhi aspek administratif dari Manajemen anggaran, tetapi juga secara substantif menjadi investasi jangka panjang dalam peningkatan mutu sumber daya manusia pendidikan. Pendekatan ini mencerminkan tata kelola keuangan sekolah yang progresif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkelanjutan.

3) Kepuasan Guru

Kepuasan guru merupakan faktor penting yang memengaruhi kualitas dan konsistensi kinerja mereka dalam menjalankan tugas pendidikan. Di SMPN 62 Muaro Jambi, aspek ini menjadi perhatian dalam Manajemen

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengingat bahwa kesejahteraan non-material seperti tersedianya sarana yang memadai untuk mengajar dapat memberikan dampak positif terhadap semangat dan produktivitas guru.

Salah satu bentuk kontribusi nyata dana BOS terhadap peningkatan kepuasan guru adalah melalui penyediaan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di kelas. Ketika guru merasa bahwa perangkat yang mereka perlukan seperti proyektor, laptop, media pembelajaran, serta bahan ajar tambahan dapat tersedia dengan dukungan anggaran BOS, hal ini menciptakan rasa dihargai dan didukung oleh institusi. Kepuasan tersebut tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga fungsional, karena langsung berpengaruh terhadap efektivitas mereka dalam menyampaikan materi pembelajaran.

Dalam wawancara yang dilakukan, beberapa guru menyampaikan bahwa keterlibatan mereka dalam proses perencanaan anggaran membuat mereka merasa lebih memiliki terhadap hasil dari penggunaan dana BOS. Mereka tidak hanya menjadi objek penerima manfaat, tetapi juga subjek aktif dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi dalam Manajemen dana, termasuk pelaporan terbuka dan diskusi rutin bersama kepala sekolah serta bendahara BOS, semakin memperkuat kepercayaan guru terhadap sistem manajemen sekolah. Kepercayaan ini pada akhirnya berkontribusi terhadap terbentuknya iklim kerja yang positif dan kolaboratif.

Rasa puas yang muncul dari Manajemen dana yang tepat juga berkontribusi pada peningkatan komitmen guru, baik terhadap tanggung

jawab pengajaran maupun terhadap pengembangan diri secara profesional. Guru menjadi lebih termotivasi untuk menghadiri pelatihan, mengikuti workshop, dan menerapkan metode-metode baru dalam proses belajar-mengajar, karena mereka merasa sistem di sekolah mendukung pertumbuhan mereka.

Seperti yang dijelaskan oleh (Handoko, 2021) kepuasan kerja sangat berkaitan dengan motivasi dan kinerja, dan fasilitas yang memadai adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepuasan tersebut. Kinerja guru dalam konteks pendidikan mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan kemampuan dan usaha guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Ada beberapa dimensi penting yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah paedagogik, metode pengajaran, dan pengembangan profesi. Berikut adalah penjelasan terkait ketiga aspek tersebut:

1. Paedagogik

Paedagogik merujuk pada kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Ini mencakup pemahaman guru tentang teori-teori pembelajaran, cara-cara menyampaikan materi secara efektif, serta menciptakan suasana belajar yang mendukung. Aspek paedagogik ini dapat meliputi Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, Manajemen kelas, dan Evaluasi pembelajaran

2. Metode pengajaran

Metode pengajaran mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Dalam konteks

peningkatan kinerja guru, penerapan metode pengajaran yang tepat sangat penting, yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode problem solving, metode berbasis proyek, metode teknologi. Penggunaan berbagai metode pengajaran yang bervariasi sangat penting dalam mengakomodasi gaya belajar yang berbeda dari para siswa.

3. Pengembangan

Pengembangan profesi guru adalah usaha untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan profesional mereka, yang mencakup pelatihan dan workshop, pendidikan lanjutan, kolaborasi dengan rekan guru, dan refleksi diri.

Ketiganya saling berhubungan erat. Misalnya, paedagogik yang baik akan mempengaruhi bagaimana metode pengajaran diterapkan, dan dengan menggunakan metode pengajaran yang efektif, guru dapat meningkatkan pengembangan profesi mereka melalui pengalaman praktis dalam kelas. Di sisi lain, pengembangan profesi memungkinkan guru untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan paedagogik dan metode pengajaran mereka.

Penggunaan dana BOS bisa diarahkan untuk mendukung ketiga aspek ini, seperti pelatihan guru untuk meningkatkan paedagogik dan metode pengajaran yang lebih inovatif, Pengadaan sumber belajar yang dapat digunakan untuk mendukung keberagaman metode pengajaran, termasuk alat bantu belajar berbasis teknologi, Program pengembangan karier guru seperti sertifikasi dan pendidikan lanjutan yang dapat dibiayai melalui dana

BOS. Jika dana BOS dikelola dengan baik, maka peningkatan kinerja guru dapat tercapai, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Upaya peningkatan kinerja guru melalui Manajemen dana BOS tercermin dalam beberapa program yang rutin dilaksanakan sekolah. Di antaranya adalah pembiayaan kegiatan pelatihan dan workshop internal, pengadaan bahan ajar dan media pembelajaran digital, serta insentif untuk kegiatan tambahan yang dilakukan guru di luar tugas pokok, seperti pembimbingan lomba, pengembangan perangkat ajar, dan kegiatan remedial. Guru-guru menyatakan bahwa adanya dukungan dana BOS membuat mereka lebih terbantu dalam menjalankan tugas, lebih termotivasi, serta memiliki akses terhadap sumber belajar dan pelatihan yang relevan.

Dalam perencanaan Manajemen dana, sekolah melibatkan guru dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sehingga program-program yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Guru diberikan ruang untuk mengusulkan program peningkatan mutu, dan sebagian besar diakomodasi dalam perencanaan anggaran tahunan. Hal ini menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi dari para guru terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai BOS.

Secara organisasi, Manajemen dana BOS dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama, bendahara sebagai pengelola keuangan, serta guru sebagai

pelaksana program. Koordinasi dilakukan secara rutin melalui rapat sekolah, dan setiap kegiatan dipantau pelaksanaannya untuk memastikan dana digunakan secara efektif.

Evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS juga menjadi perhatian sekolah. Setiap akhir semester, sekolah mengadakan rapat evaluasi untuk melihat sejauh mana kegiatan yang dijalankan berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan kinerja guru. Penilaian ini dilakukan tidak hanya dari sisi laporan keuangan, tetapi juga melalui refleksi bersama terhadap hasil belajar siswa, efektivitas metode mengajar guru, dan ketercapaian tujuan pembelajaran.

4.4 Pembahasan

Manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan mendukung operasional pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah. Salah satu aspek krusial dari pemanfaatan dana BOS adalah kontribusinya terhadap peningkatan kinerja guru. Guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum memiliki peran sentral dalam menentukan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, bagaimana dana BOS dikelola dan dialokasikan sangat menentukan efektivitas upaya peningkatan kapasitas dan kinerja guru (Maulida et al., 2024).

Secara garis besar, penggunaan dana BOS telah diarahkan oleh pemerintah agar mendukung pelaksanaan program-program peningkatan kualitas pendidikan.

Di antaranya adalah penyediaan pelatihan guru, pengadaan sarana pembelajaran, dan pendanaan kegiatan pengembangan profesional guru seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Hal ini menjadi sangat relevan dalam upaya penguatan kualitas pengajaran, karena salah satu kendala utama dalam pendidikan di tingkat sekolah adalah rendahnya kapasitas pedagogis dan kurangnya akses guru terhadap pengembangan kompetensi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori Human Capital dalam pendidikan. Teori ini menyatakan bahwa investasi pada kualitas guru (melalui pelatihan dan pengembangan) akan menghasilkan peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam proses pendidikan, yang pada akhirnya berdampak pada hasil belajar siswa (Maulida et al, 2024). Dana BOS menjadi instrumen untuk mengakumulasi "modal manusia" di tingkat sekolah.

Salah satu bentuk konkret kontribusi dana BOS terhadap peningkatan kinerja guru adalah pendanaan untuk kegiatan pelatihan, workshop, dan seminar pendidikan. Dalam Pedoman Umum BOS, terdapat pos penggunaan dana yang secara eksplisit diperuntukkan untuk peningkatan kompetensi pendidik. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis, lokakarya pengembangan kurikulum, serta pelatihan kurikulum merdeka dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Dalam praktiknya, banyak sekolah yang telah memanfaatkan dana BOS untuk mengundang narasumber profesional atau mengirim guru ke pelatihan tingkat daerah. Guru yang mengikuti pelatihan tersebut umumnya melaporkan peningkatan pemahaman terhadap metode pembelajaran aktif, pengelolaan kelas

yang efektif, serta evaluasi hasil belajar. Bahkan, beberapa guru juga mengembangkan keterampilan TIK dalam proses pembelajaran melalui pelatihan yang dibiayai dari dana BOS. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap kinerja mereka dalam menyampaikan materi ajar secara lebih variatif dan menarik. Penelitian oleh Suryana et al. (2023) menunjukkan bahwa pelatihan yang dibiayai BOS mampu meningkatkan penguasaan strategi pembelajaran aktif, sementara studi Rahmawati & Nugroho (2022) menyatakan bahwa keterlibatan guru dalam pengelolaan dana meningkatkan motivasi dan kedisiplinan mereka.

Selain itu, dana BOS juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan KKG atau MGMP secara reguler. Dalam forum tersebut, guru memiliki ruang untuk bertukar pengalaman, membahas permasalahan pembelajaran, dan merancang strategi mengajar yang lebih efektif. Dana BOS biasanya digunakan untuk kebutuhan operasional seperti konsumsi, transportasi, dan penggandaan materi. Keberlangsungan forum-forum seperti ini sangat penting sebagai bentuk pengembangan profesional guru berbasis komunitas, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas pengajaran di kelas.

Secara konseptual, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan yang didanai BOS dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat pedagogical content knowledge (PCK) guru. PCK adalah integrasi antara pengetahuan materi pelajaran dan pengetahuan tentang bagaimana mengajarkannya secara efektif. Pelatihan yang tepat membantu guru mengembangkan strategi pengajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan siswa.

Tidak hanya pelatihan, manajemen dana BOS yang baik juga berkontribusi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja guru. Guru memerlukan dukungan fasilitas untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Dana BOS memungkinkan sekolah untuk mengadakan buku ajar tambahan, modul pembelajaran, alat peraga, dan perangkat multimedia yang sangat diperlukan dalam menunjang proses belajar mengajar.

Kondisi fasilitas sekolah yang baik dan memadai berdampak langsung terhadap kepuasan dan kenyamanan kerja guru. Ketika guru memiliki akses terhadap sarana yang relevan dan berkualitas, mereka dapat menyusun rencana pembelajaran yang lebih kreatif dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Misalnya, guru IPA dapat lebih mudah melaksanakan praktikum sederhana dengan tersedianya alat laboratorium, atau guru Bahasa Indonesia dapat memanfaatkan buku-buku bacaan tambahan untuk meningkatkan minat literasi siswa. Selain itu, penyediaan perangkat digital seperti laptop dan proyektor yang didanai BOS juga memfasilitasi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang berbasis teknologi.

Ini berkaitan dengan konsep lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan fisik yang mendukung, dengan ketersediaan sumber belajar yang relevan, memfasilitasi guru dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Dana BOS berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kaya dan memberdayakan guru.

Dari perspektif teori Self-Determination, lingkungan kerja yang mendukung (termasuk ketersediaan sarana) dapat meningkatkan motivasi intrinsik guru.

Ketika guru merasa didukung dengan sumber daya yang memadai, mereka akan lebih termotivasi untuk berinovasi dalam pengajaran dan meningkatkan kinerja (Aimmah et al, 2024).

Namun demikian, tantangan yang dihadapi beberapa sekolah terutama di daerah adalah minimnya jumlah siswa dan guru. Jumlah siswa yang sedikit biasanya dipengaruhi oleh faktor geografis seperti lokasi sekolah yang terpencil, rendahnya tingkat kelahiran di daerah tersebut, jarak dengan sekolah lain yang berdekatan, atau kompetisi dengan sekolah lain yang lebih diminati masyarakat. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah juga turut memengaruhi. Ketika jumlah siswa menurun, alokasi dana BOS pun ikut berkurang karena perhitungan didasarkan pada jumlah peserta didik. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pembiayaan untuk tenaga pengajar, sehingga jumlah guru menjadi sedikit. Akibatnya, beban kerja guru meningkat karena harus mengajar lebih banyak mata pelajaran atau kelas, yang pada akhirnya bisa menurunkan kualitas pembelajaran.

Manajemen dana BOS yang transparan dan partisipatif menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas penggunaannya. Ketika perencanaan dan pengelolaan dana melibatkan guru secara aktif, maka alokasi anggaran akan lebih sesuai dengan kebutuhan riil pembelajaran di kelas. Dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), keterlibatan guru dalam proses musyawarah dapat memastikan bahwa program-program prioritas seperti pelatihan guru atau pengadaan sarana ajar benar-benar mendapatkan porsi yang memadai.

Beberapa studi menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan manajemen partisipatif dan transparan terhadap penggunaan dana BOS mengalami peningkatan akuntabilitas dan kinerja guru yang lebih tinggi. Guru yang merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan akan memiliki rasa tanggung jawab dan kepemilikan yang lebih besar terhadap program-program sekolah. Hal ini pada akhirnya berdampak terhadap motivasi kerja dan kedisiplinan guru dalam melaksanakan tugas mengajar.

Transparansi juga meningkatkan kepercayaan antarpihak dalam sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga komite sekolah dan orang tua siswa. Laporan pertanggungjawaban keuangan yang terbuka dan dapat diakses menjadi instrumen kontrol yang mendorong efektivitas penggunaan dana BOS sesuai peruntukannya. Di lingkungan seperti ini, guru tidak hanya menjadi objek dari kebijakan sekolah, tetapi juga subjek aktif yang turut merancang dan menjalankan program pendidikan.

Temuan ini mendukung prinsip kepemimpinan transformasional dalam konteks manajemen sekolah. Ketika guru merasa dihargai dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mereka akan lebih berkomitmen terhadap tujuan sekolah. Transparansi membangun kepercayaan dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana.

Secara teoritis, partisipasi guru dalam pengambilan keputusan terkait anggaran pendidikan dapat meningkatkan *sense of efficacy* (keyakinan akan kemampuan diri) mereka (Nugroho, 2022). Ketika guru merasa memiliki kontrol

dan pengaruh terhadap sumber daya yang digunakan dalam pekerjaan mereka, mereka cenderung lebih proaktif dan bertanggung jawab terhadap kinerja mereka.

Dalam konteks tersebut, fungsi dan tujuan manajemen dana BOS harus dijalankan berdasarkan lima prinsip utama: efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Efisiensi berarti penggunaan dana dilakukan secara hemat dan optimal, seperti pemilihan pelatihan yang tepat guna dan pengadaan alat ajar multifungsi. Efektivitas mengacu pada sejauh mana dana BOS menghasilkan dampak nyata dalam peningkatan kompetensi guru dan hasil belajar siswa. Produktivitas tercermin dari banyaknya kegiatan pengembangan yang berdampak langsung terhadap kualitas pengajaran dan keterlibatan guru dalam program-program sekolah.

Selanjutnya, transparansi dalam pengelolaan dana BOS sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara warga sekolah. Keterlibatan guru dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan program. Studi menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan manajemen partisipatif terhadap BOS mengalami peningkatan akuntabilitas dan kinerja guru (Rahmawati & Nugroho, 2022). Laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses semua pihak menjadi alat kontrol penting dalam memastikan penggunaan dana sesuai sasaran.

Terakhir, prinsip akuntabilitas menuntut sekolah untuk tidak hanya melaporkan pengeluaran secara administratif, tetapi juga secara substantive yaitu sejauh mana penggunaan dana memberikan perubahan terhadap kualitas proses

dan hasil belajar. Dalam model pendidikan Input-Process-Output, dana BOS sebagai input, bila dikelola dengan baik (proses), akan menghasilkan peningkatan kinerja guru dan hasil belajar siswa (Sulistyowati et al., 2024).

Kinerja guru juga dapat meningkat ketika ada insentif finansial yang diberikan secara proporsional. Guru yang merasa dihargai secara profesional akan memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi dan berkomitmen terhadap tugasnya. Semua aspek ini bermuara pada satu tujuan utama: peningkatan mutu pendidikan. Manajemen dana BOS yang tepat sasaran, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi pilar penting dalam strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan di sekolah.

Pengaruh manajemen dana BOS terhadap kinerja guru dapat dilihat dalam beberapa indikator seperti peningkatan motivasi, keterampilan pedagogis, dan hasil pembelajaran siswa. Guru yang mendapatkan pelatihan dan dukungan sarana pembelajaran cenderung lebih percaya diri dalam mengajar dan memiliki variasi pendekatan pembelajaran. Hal ini membuat proses belajar mengajar lebih dinamis dan mampu menjawab kebutuhan beragam siswa di kelas.

Ini mengkonfirmasi bahwa investasi pada guru melalui dana BOS memiliki efek domino positif. Guru yang kompeten dan termotivasi akan menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa.

Kemudian Evaluasi kinerja guru di SMP Negeri 62 Muaro Jambi dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan untuk memastikan kualitas

pembelajaran tetap terjaga. Evaluasi ini mencakup tiga pendekatan utama, yaitu asesmen formatif, portofolio, dan evaluasi diri sekolah. Melalui asesmen formatif, kepala sekolah atau koordinator pembelajaran melakukan observasi langsung di kelas guna menilai strategi pembelajaran, keterlibatan siswa, serta efektivitas pengelolaan kelas oleh guru. Sementara itu, portofolio guru mencakup kumpulan dokumen yang menunjukkan capaian kerja, seperti rencana pembelajaran, instrumen penilaian, hasil pekerjaan siswa, serta dokumentasi kegiatan proyek. Portofolio ini menjadi bukti nyata profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas. Selain itu, evaluasi diri sekolah dilakukan untuk menilai kinerja guru secara kolektif berdasarkan indikator mutu pendidikan, termasuk partisipasi guru dalam pengembangan sekolah, keaktifan dalam komunitas belajar, serta kemampuan dalam mendukung ketercapaian tujuan kurikulum. Ketiga bentuk evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dalam kinerja guru.

Indikator Kinerja Guru Berdasarkan Rapor Pendidikan menunjukkan capaian dan tantangan yang relevan terhadap kualitas proses pembelajaran di SMP Negeri 62 Muaro Jambi. Salah satu indikator yang mengalami peningkatan signifikan adalah kemampuan numerasi siswa, yang mencerminkan efektivitas pengajaran guru, khususnya dalam mata pelajaran matematika dan IPA. Peningkatan ini dapat diasosiasikan dengan penggunaan metode pembelajaran yang lebih kontekstual dan pemanfaatan media ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, iklim kebhinekaan tercatat sebagai indikator terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah berhasil membangun suasana

belajar yang inklusif, toleran, dan menghargai keberagaman. Lingkungan sekolah yang menerima perbedaan dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu kekuatan dalam proses pembentukan karakter siswa.

Meski demikian, indikator karakter masih menunjukkan hasil yang rendah. Hal ini menjadi catatan penting bagi pihak sekolah, karena pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan utama pendidikan nasional. Rendahnya indikator ini mendorong sekolah untuk meningkatkan peran guru sebagai model perilaku positif serta pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam pembelajaran sehari-hari. Oleh karena itu, pembinaan guru secara berkelanjutan, terutama dalam pendidikan karakter dan penguatan Profil Pelajar Pancasila, menjadi fokus pengembangan sekolah ke depan. Guru perlu difasilitasi agar mampu merancang kegiatan belajar yang tidak hanya berorientasi pada capaian kognitif, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai integritas, kemandirian, gotong royong, dan tanggung jawab dalam diri peserta didik.